

SKRIPSI

ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2022



Disusun Oleh:

**DILA MASYITAH
NIM. 190604073**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dila Masyitah
NIM : 190604073
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Yang Menyatakan



Dila Masyitah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022

Disusun Oleh:

Dila Masyitah
NIM: 190604073

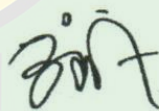
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II

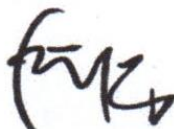


Winny Dian Safitri, M.Si
NIP. 199005242022032001

AR - RANIRY

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi



Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022

Dila Masyitah
NIM. 190604073

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 25 Juli 2023 M
7 Muharram 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Winny Dian Safitri, M.Si
NIP. 199005242022032001

Penguji I,

Penguji II

Khairul Amri, S.E., M.Si
NIDN. 0106077507

Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dila Masyitah
NIM : 190604073
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : 190604073@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 25 Juli 2023

Penulis

Dila Masyitah
NIM. 190604073

Mengetahui

Pembimbing I

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II

Winny Dian Safitri, M.Si
NIP. 199005242022032001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".

(Q.S. Al-Baqarah [2] : 286)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan".

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan".

(Q.S. Al-Insyirah [94] : 5-6)

"Tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah, namun semua terasa mudah apabila melibatkan Allah SWT dalam setiap langkah".

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta serta adik-adik saya tersayang. Terimakasih telah mendoakan, mendengarkan keluh kesah perjuangan, menasehati tanpa henti dan selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan berkat Rahmat, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022”**. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kehidupan manusia lebih bermakna dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. DR. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.
2. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, dan Ana Fitria, SE., M.Sc, RSA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi
3. Hafiih Maulana, SP, SHI, ME. selaku ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu

dalam penulisan skripsi ini.

4. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA sebagai dosen pembimbing I, dan Winny Dian Safitri, M.Si. sebagai pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Khairul Amri, S.E., M.Si selaku penguji I dan Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc selaku penguji II yang telah memberikan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, dan seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Terima kasih yang teristimewa kepada Ayahanda Zainuddin yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan mengingatkan pentingnya belajar dan mengikhlaskan, dan Ibunda Erlina Nurdin yang senantiasa mendoakan, mengingatkan untuk terus bersabar dan bersyukur sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga akhir. Untuk adik-adik tercinta Muhammad Hafizh, Muhammad Ajibar dan Nabil yang telah mendoakan dan menghibur penulis, dan kepada seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang.

8. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat Ika Fazira, S.Pd., Indah, Novita Hemayanti, Putri Amisha Ammar, Nabila Mauliza Amna, S.T., Risa Ariani, Zahratun Raihan, Rizka Riana, Nurmalia dimana telah memberikan dukungan besar serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Ekonomi leting 2019 dan kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tetapi telah mendoakan dan memberikan motivasi untuk peneliti.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang Ilmu Ekonomi pada umumnya dan yang terkait hasil penelitian dalam penulisan Skripsi ini pada khususnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Penulis,



Dila Masyitah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b Vocal Tunggal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa: كيف

hauula: هول

3. *Maddah*

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla: قال

ramā: رمى

qīla: قيل

yaqūlu: يقول

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.
- Ta marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Ṭalḥah:

طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Dila Masyitah
NIM : 190604073
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : Analisis *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022.
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE., M.Si., AK., CA
Pembimbing II : Winny Dian Safitri, M.Si
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah dan *Flypaper Effect*.

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Melalui dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintahan daerah dapat melakukan pembelanjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah, serta untuk mengetahui adanya *flypaper effect* pada pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Data penelitian menggunakan estimasi data panel atau gabungan antara *cross section* dengan *time series* pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama lima tahun dari 2018-2022 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* yang diolah menggunakan *EViews 12*. Hasil dari penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Aceh tahun 2018-2022. Sementara, DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Provinsi Aceh tahun 2018-2022. Tingkat koefisien DAU dan DAK jauh lebih tinggi tingkat dalam mempengaruhi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh masih memiliki ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dalam mengelola keuangan sehingga membuktikan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2022 terjadi *Flypaper Effect*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .	v
FROM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Pembahasan	16
 BAB II LANDASAN TEORI:	 18
2.1 Belanja Daerah	18
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	33
2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)	 34
2.3.2 Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)	 35
2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	35
2.4.1 Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK)	 36
2.4.2 Perhitungan Dana Alokasi Khusus	

(DAK)	37
2.5 <i>Flypaper Effect</i>	38
2.6 Teori Keagenan	42
2.7 Pengaruh Antar Variabel Penelitian	43
2.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah	43
2.7.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah	44
2.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah	45
2.7.4 <i>Flypaper Effect</i> Terhadap Belanja Daerah	45
2.8 Penelitian Terkait	46
2.9 Kerangka Berfikir	60
2.10 Hipotesis	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	63
3.1 Desain Penelitian	63
3.2 Sumber Data	63
3.3 Operasional Variabel	64
3.4 Metode dan Analisis	65
3.4.1 Regresi Data Panel	65
3.4.2 Pengujian Model	68
3.5 Uji Hipotesis	70
3.5.1 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	70
3.5.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) ...	71
3.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	72
3.6 Penentuan <i>Flypaper Effect</i>	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	74
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	74
4.2 Deskripsi Penelitian	76
4.2.1 Belanja Daerah	77
4.2.2 Pendapatan Asli Daerah	78
4.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	80
4.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	81
4.3 Estimasi Regresi Data Panel	84
4.3.1 Uji Chow	84

4.3.2 Uji Hasuman	85
4.4 Model Regresi Panel <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	86
4.5 Uji Hipotesis	89
4.5.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) ..	89
4.5.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	91
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	91
4.6 Pengujian <i>Flypaper Effect</i>	92
4.7 Pembahasan	96
4.7.1 Pengaruh Pendapapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	96
4.7.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	98
4.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ...	99
4.7.4 Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh	101
BAB V PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	110
BIODATA PENULIS	122

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	55
Tabel 3.1 Operasional Variabel	64
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	75
Tabel 4.2 Rata-Rata Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	83
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow	85
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman	86
Tabel 4.5 Hasil <i>Fixed Effect Model</i>	87
Tabel 4.6 Hasil Uji T	89
Tabel 4.7 Hasil Uji F	91
Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	91
Tabel 4.9 Hasil Pengujian <i>Flypaper Effect</i> Pada DAU 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	93
Tabel 4.10 Hasil Pengujian <i>Flypaper Effect</i> Pada DAK 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	3
Gambar 1.2 Grafik Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	5
Gambar 1.3 Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	7
Gambar 1.4 Grafik Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	9
Gambar 1.5 Grafik Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	10
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	60
Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Aceh	74
Gambar 4.2 Grafik Rata-Rata Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	77
Gambar 4.3 Grafik Rata-Rata Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah) ...	79
Gambar 4.4 Grafik Rata-Rata Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah) .	80
Gambar 4.5 Grafik Rata-Rata Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah) ...	82

DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
BPKA	: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
DJPk	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
CEM	: Common Effect Model
FEM	: Fixed Effect Model
REM	: Random Effect Model



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Data Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	110
Lampiran 2	Rata-Rata Data Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	115
Lampiran 3	<i>Common Effect Model</i> (CEM)	116
Lampiran 4	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	117
Lampiran 5	<i>Random Effect Model</i> (REM)	118
Lampiran 6	Chow Test	119
Lampiran 7	Hausman Test	119
Lampiran 8	Tinjauan <i>Flypaper</i> Effect Ukuran DAU	120
Lampiran 9	Tinjauan <i>Flypaper</i> Effect Ukuran DAK	121
Biodata		122

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh merupakan salahsatu provinsi di Indonesia yang mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak tahun pertama 2008 hingga saat ini, Aceh telah menjalani otonomi khusus yang sudah berlangsung kurang lebih lima belas tahun. Hal ini merupakan Provinsi Aceh mendapat perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Otonomi khusus diberikan dengan harapan pelayanan, pemberdayaan masyarakat yang dapat ditingkatkan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Aceh yang masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Landasan hukum otonomi khusus Aceh terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, menyebutkan bahwa dana otonomi khusus adalah penerimaan Aceh yang digunakan terutama untuk pemeliharaan infrastruktur dan pembiayaan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam suatu kesatuan kerangka yang meliputi pembagian keuangan, pembagian secara

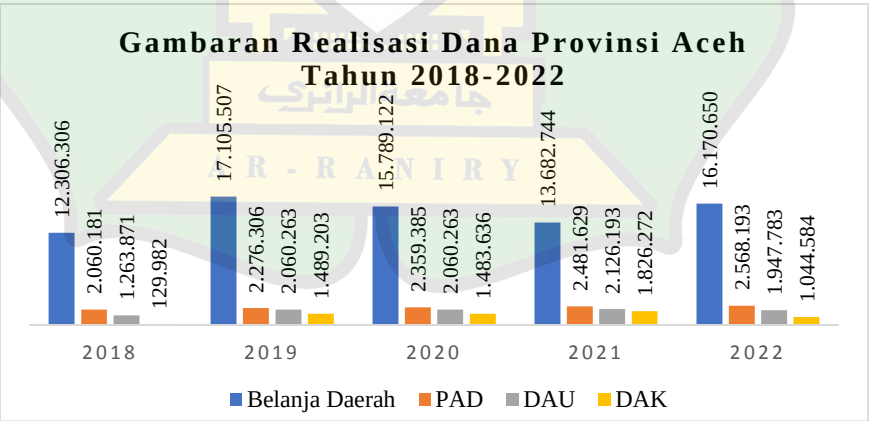
proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan memperhatikan potensi-potensi dan kebutuhan suatu daerah (Zulfan & Maulana, 2019). Dana perimbangan merupakan bagian penting dalam hubungan fiskal pusat-daerah, dan merupakan sumber pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang digunakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan kekuasaannya dan mencapai tujuan pemberdayaan otonomi daerah, yaitu terutama untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Jannah Hilyatul, 2020).

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan APBD yang dikelola dengan baik dan efektif, maka setiap pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja daerah dengan efektif, karena belanja daerah ialah salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Belanja daerah merupakan pengeluaran anggaran daerah untuk pembelian aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat bagi daerah (Nurdiwaty et al., 2017). Sarana dan prasarana umum yang dapat menunjang berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat merupakan tujuan dari belanja daerah itu sendiri. Belanja daerah juga dapat digunakan untuk menilai kesesuaian tindakan atau kebijakan yang

diterapkan oleh pemerintah daerah dengan perannya dalam perekonomian, Zahari (2017).

Penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sumber pendanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan pendapatan sah lainnya. Dana perimbangan atau dana transfer meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Gambaran dana yang diperoleh Pemerintah Aceh dan Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah).



Sumber: BPS Provinsi Aceh (diolah, 2023)

Provinsi Aceh masih bergantung pada dana yang disediakan oleh pemerintah pusat yang berupa dana transfer untuk memenuhi kebutuhan daerah, terbukti dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Provinsi Aceh periode 2018-2022 tidak berbeda jauh dengan dana dari pendapatan asli daerah. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sumber pendapatan lainnya, seperti pendapatan transfer, dapat mengetahui tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah (Perda) (Putra & Hidayat, 2016).

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan seberapa baik suatu daerah dapat mengelola dan mengatur sumber daya keuangannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya, dan dengan kemandiriannya, dapat memastikan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik yang akan disediakan di daerahnya.

Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota yang membentuk 23 Kabupaten/Kota. Perkembangan suatu daerah juga dinilai dari belanja yang digunakan, dimana belanja daerah merupakan jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk mendanai pelaksanaan semua kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Grafik dibawah ini menunjukkan Belanja daerah Kabupaten/kota Aceh dari tahun 2018 hingga tahun 2022:

Gambar 1.2 Grafik Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber : BPKA Provinsi Aceh (diolah,2023)

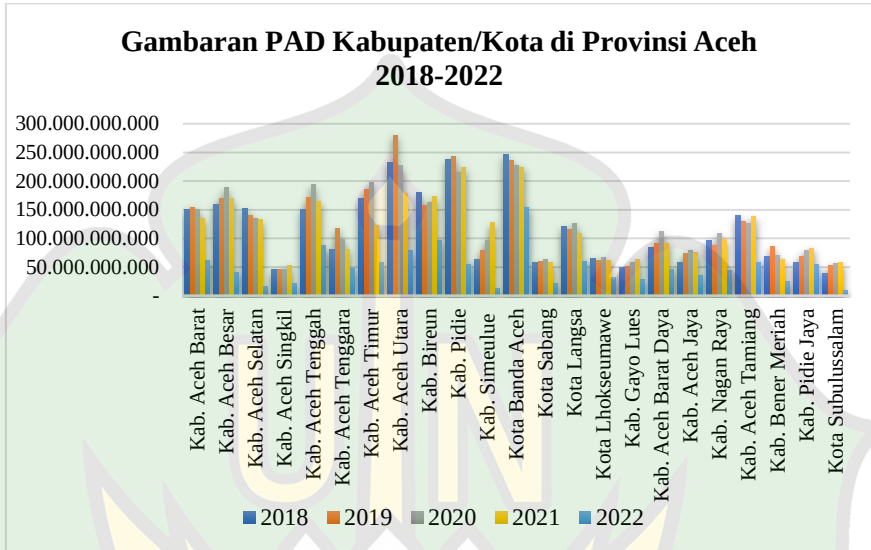
Belanja daerah di Provinsi Aceh mengalami kenaikan dan penurunan selama lima tahun terakhir. Rata-rata belanja daerah Provinsi Aceh lebih rendah dari Negara Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan lebih aktif dan terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dan mendistribusikan dana pada semua kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian. Setiap kota atau kabupaten didorong untuk dapat memaksimalkan potensi ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan perekonomian. Dengan demikian, pembangunan daerah dilakukan secara terkoordinasi dan serasi, serta diarahkan pengelolaannya supaya pembangunan setiap daerah dapat sesuai

dengan prioritas dan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. (Azizah, 2021).

Daerah dapat meningkatkan standar pelayanan publik yang ditawarkan kepada masyarakat jika memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup. Dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, serta berbagai kebutuhan publik lainnya. Dengan memiliki sumber pendapatan sendiri, daerah dapat menjadi lebih mandiri dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pelayanan publik, sehingga tidak terlalu tergantung pada kebijakan pusat. Keadaan ini memungkinkan daerah untuk merespons kebutuhan lokal dengan lebih tepat dan fleksibel.

Pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dari sumber-sumber internal seperti pajak daerah, retribusi daerah dan semua hasil usaha daerah, ini semua mencakup pada pendapatan asli daerah, semakin besar porsi pendapatan asli daerah dalam total pendapatan daerah, maka semakin mandiri keuangannya. Berikut ini adalah laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh tahun 2018-2022.

Gambar 1.3 Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber : BPKA Provinsi Aceh (diolah,2023)

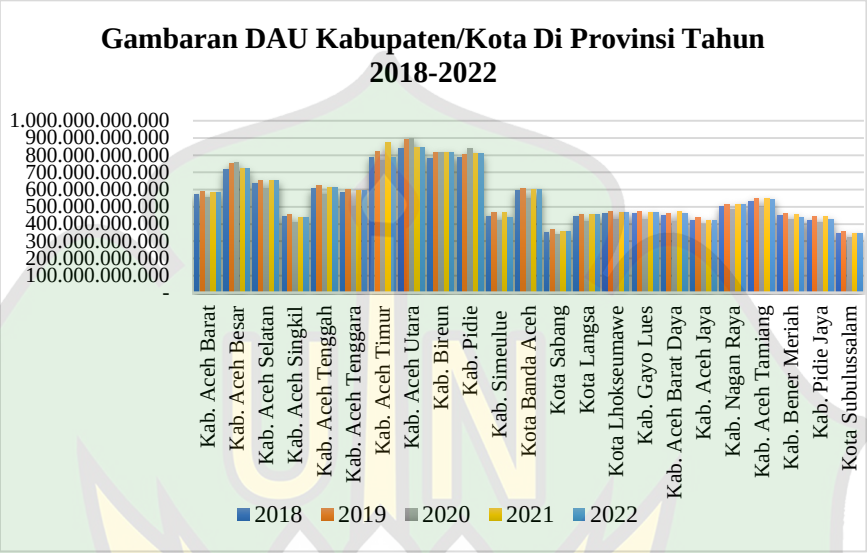
Provinsi Aceh mampu membiayai kebutuhannya dengan menggunakan dana sendiri, hal ini sejalan dengan peran pendapatan asli daerah dalam pendapatan pemerintah daerah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh data laporan realisasi pendapatan asli daerah. Pendapatan pemerintah provinsi Aceh dalam kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mengingat sumber ini merupakan cara bagi masyarakat setempat untuk mendanai upaya pembangunan secara langsung. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka

pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menaati pembayaran pajak, retribusi daerah.

Dana yang dihasilkan setiap daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu berbeda-beda. Daerah dengan perkembangan industri yang kuat dan sumber daya alam yang melimpah biasanya memiliki PAD yang jauh lebih besar daripada daerah lain, begitu pula sebaliknya. Akibatnya terjadi ketimpangan pendapatan asli daerah. Di satu sisi ada daerah dengan PAD tinggi yang kaya raya, sementara di sisi lain ada daerah dengan PAD rendah yang tertinggal.

Namun demikian, untuk membangun suatu daerah, penting untuk mempelajari dan memperhitungkan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam setiap anggaran APBD yang diterima pemerintah untuk memastikan kelangsungan ekonomi atau pembangunan daerah. Dalam rangka penerapan desentralisasi, pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah merupakan salah satu fungsi utama dari Dana Alokasi Umum (DAU) daerah. Data Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Aceh dari tahun 2018 sampai 2022 adalah sebagai berikut:

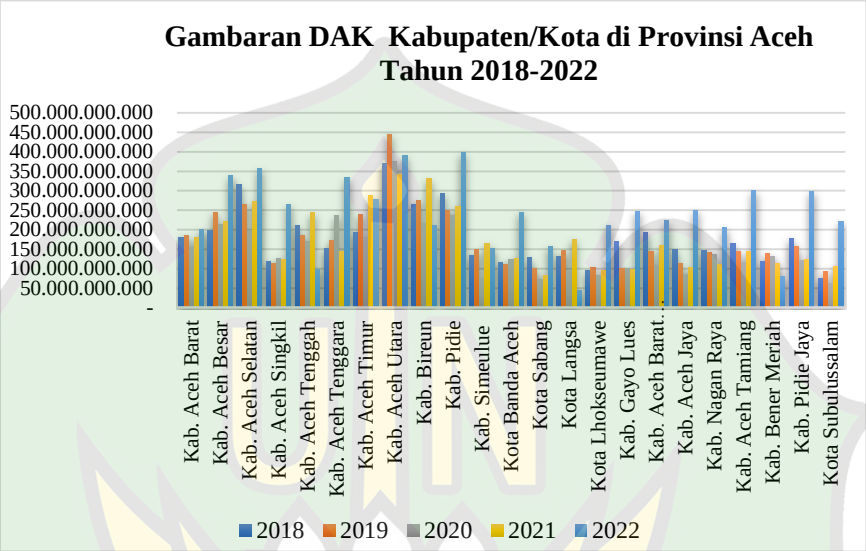
Gambar 1.4 Grafik Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber : BPKA Provinsi Aceh (diolah,2023)

Kabupaten Aceh Utara yang Dana Alokasi Umum dari tahun 2018 sebesar Rp835.915,56 tahun 2019 sebesar Rp893.015,39 tahun 2020 sebesar Rp897.980,13 tahun 2021 sebesar Rp844.790,24 dan tahun 2022 sebesar Rp843.915,86 merupakan salah satu dari 23 kabupaten/ kota di Aceh Provinsi yang memiliki realisasi Dana Alokasi Umum yang tinggi selama lima tahun terakhir. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara dapat dikatakan berhasil merealisasikan Dana Alokasi Umum hanya dalam waktu lima tahun.

Gambar 1.5 Grafik Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber :BPKA Provinsi Aceh (diolah,2023)

Berdasarkan grafik di atas, dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara lah yang memiliki realisasi Dana Alokasi Khusus yang tinggi selama lima tahun terakhir. Dimana dana alokasi khusus tahun 2018 sebesar Rp368.966,29 tahun 2019 Rp444.119.79 tahun 2021 Rp375.269,15 tahun 2021 Rp340.224,37 dan tahun 2022 Rp389.421,67. Dapat dikatakan Kabupaten Aceh Utara juga telah berhasil merealisasikan Dana Alokasi Khusus hanya dalam waktu lima tahun.

Dana dari Pendapatan Asli Daerah tidak jauh berbeda dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) di Provinsi Aceh, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Aceh masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah. Masalah yang sering terjadi ketika pemerintah daerah terlalu mengandalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah, dan tidak berusaha atau gagal memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya, hal ini dikenal dengan istilah *flypaper effect*.

Flypaper effect disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diperoksisikan dengan DAU dan DAK dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diperoksisikan dengan PAD, dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kecenderungan menggunakan dana dari pemerintah pusat dibandingkan menggunakan dana dari pendapatan daerah yang dimiliki atau yang dikenal dengan PAD.

Flypaper effect adalah fenomena yang terjadi ketika pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (berlebihan) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) dari pusat yang diproksikan dengan DAU dan DAK, bukan menggunakan kemampuan sendiri yang diproksikan dengan PAD. Dalam situasi ini, pemerintah daerah cenderung menggunakan dana dari pemerintah pusat dibandingkan menggunakan dana dari pendapatan daerah yang dimiliki atau dikenal dengan PAD.

Penelitian terhadap *flypaper effect* telah banyak dilakukan, penelitian Solikin (2017) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sehingga terjadi *flypaper effect*. Bertolakbelakang dengan penelitian Adiputra (2017) yang menjelaskan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh dengan signifikansi terhadap belanja daerah, yang menyebabkan tidak terjadinya *flypaper effect*.

Penelitian (Amalia Wia Rizki, Nor Wahyudin, 2015) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap belanja daerah tanpa menimbulkan *flypaper effect*. Berbeda dengan Aprilia & Saputra (2013) yang menjelaskan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah sehingga menyebabkan terjadinya *flypaper effect*.

Penelitian Inayati dan Setiawan (2016), menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah yang menyebabkan terjadinya *flypaper effect*. Sementara itu, penelitian Ekawati menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, artinya tidak terjadi *flypaper effect*.

Dari hasil penelitian sebelumnya, peneliti ingin menganalisis terkait **Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
5. Apakah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ialah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Dana Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
5. Untuk mengetahui terjadi fenomena *flypaper effect* pada pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Untuk masyarakat, penelitian ini bisa menyajikan cerminan cukup jelas tentang pendistribusian beragam

kapasitas dan sumber daya pada sebuah provinsi agar dapat memenuhi sarana bagi kemakmuran masyarakat.

- b. Sebagai sumber, literatur dan bahan informasi tentang belanja daerah di Provinsi Aceh.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Pemerintah, sebagai landasan pengelolaan belanja daerah di Provinsi Aceh.
- b. Bagi Peneliti, kajian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberikan perspektif baru terhadap permasalahan ekonomi yang ada di sekitarnya.
- c. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru dan menjadi sumber untuk studi lebih lanjut pada penelitian yang terkait.

3. Manfaat Kebijakan :

- a. Untuk meningkatkan dan memberikan masukan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam melakukandan..... menyusun strategi untuk pengembangan dalam bidang yang bersangkutan dengan penelitian ini.
- b. Untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sangat penting untuk pembangunan daerah melalui belanja daerah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika pembahasan penelitian ini:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab satu menjelaskan latar belakang mengenai analisis *flypaper effect* pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah di Provinsi Aceh. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pembahasan secara sistematika tentang temuan penelitian semuanya tercakup pada bab ini.

Bab II: Landasan Teoritis

Bab dua menjelaskan landasan-landasan teori yang dapat menjadi dasar dan digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini yaitu teori-teori yang relevan dan mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dalam bab ini juga dicantumkan penelitian terdahulu yang merupakan penelitian yang menjadi dasar pengembangan bagi penulisan penelitian ini. Pada bab ini juga dikemukakan hipotesis dan kerangka pemikiran.

Bab III: Metodologi Penelitian

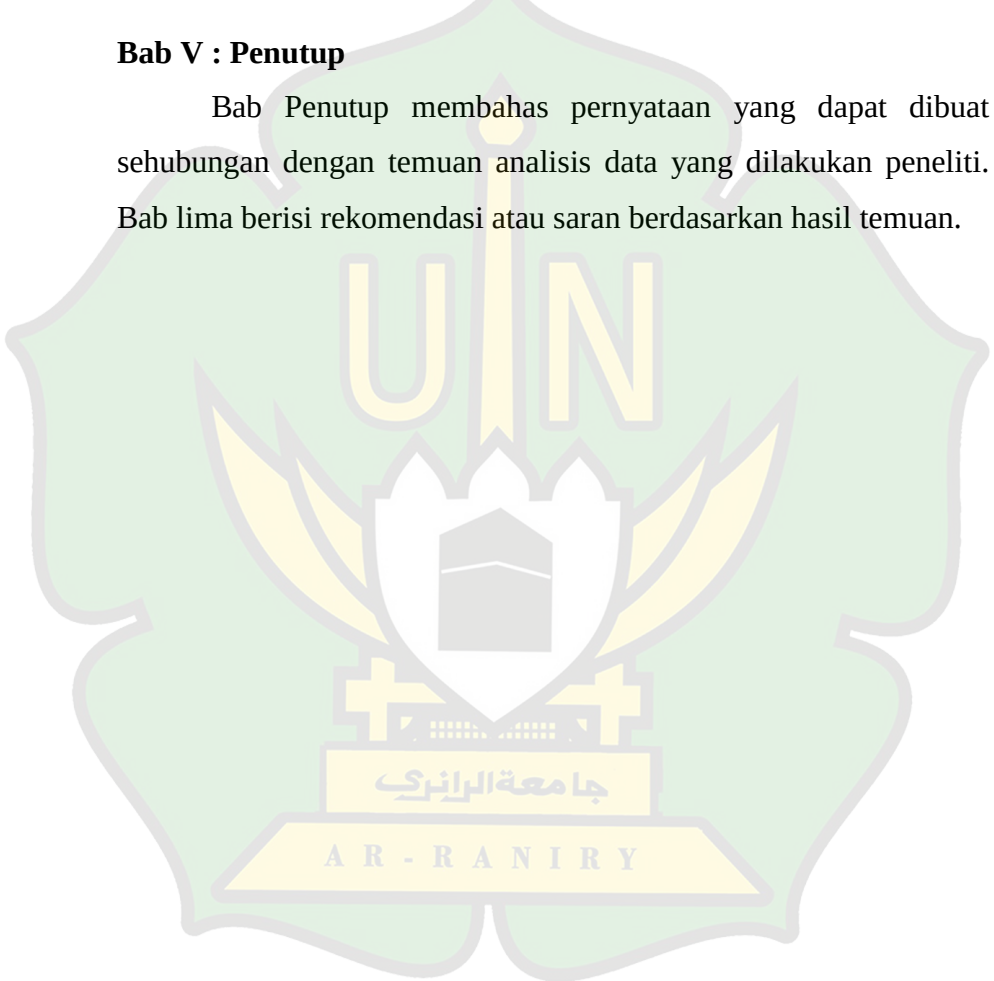
Bab tiga menjelaskan tentang bagaimana peneliti akan melaksanakan penelitian secara operasional yang menguraikan desain penelitian, sumber data, uji validitas dan reliabilitas, definisi dan operasionalisasi variabel, metode dan teknik analisis data, serta pengujian hipotesis.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian, menganalisis data penelitian dan membahas temuan dari analisis objek penelitian yang sudah ada.

Bab V : Penutup

Bab Penutup membahas pernyataan yang dapat dibuat sehubungan dengan temuan analisis data yang dilakukan peneliti. Bab lima berisi rekomendasi atau saran berdasarkan hasil temuan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Belanja Daerah

Kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak dapat dikembalikan kepada daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan dari rekening kas umum daerah yang menurunkan ekuitas dana lancar ini disebut dengan belanja daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten, atau kota dan meliputi kegiatan wajib, kegiatan pilihan dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam kerjasama dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah, tergantung pada keadaan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Pembelanjaan untuk hal-hal yang bersifat wajib, menurut Darise (2008:138), mengacu pada tugas-tugas yang sangat mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah untuk memberikan hak dan manfaat yang esensial kepada semua masyarakat. Melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tetap menjalankan tugas daerah menjadi prioritas utama. Pertumbuhan sistem sosial, peningkatan infrastruktur publik, layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan termasuk dalam kategori

pengeluaran ini. Sedangkan belanja urusan pilihan, meliputi kegiatan pemerintahan yang benar-benar dilaksanakan dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan keadaan, karakteristik, dan manfaat yang diharapkan dari daerah yang bersangkutan. Pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya alam, pariwisata, kehutanan dan perikanan, perdagangan, industri, dan transmigrasi semuanya termasuk dalam klasifikasi pengeluaran berdasarkan urusan pilihan.

Bagian penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau wilayah adalah mengalokasikan belanja dengan bijak. Pengeluaran dari belanja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kinerjanya dan untuk menginformasikan kepada publik tentang bagaimana pembangunan yang telah dilaksanakan. Namun demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala di bidang ini, antara lain Pertama, alokasi anggaran untuk beberapa daerah belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Kedua, masih terbatasnya dana yang tersedia baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang seringkali menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketiga, proses alokasi anggaran dan belanja tidak efisien. Keempat, praktik dan prosedur pelayanan kurang standar dan transparan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan mengenai APBN-APBD, belanja daerah mencakup semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah. Belanja daerah dibagi menjadi belanja langsung dan tidak langsung, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, yang kemudian diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 dan kemudian diubah kembali menjadi Permendagri 21 Tahun 2011.

Belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan disebut belanja tidak langsung. Ini memiliki beberapa bagian, termasuk:

a. Belanja pegawai :

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, belanja pegawai meliputi pembayaran yang dilakukan kepada pegawai negeri sipil (PNS), pejabat negara, dan pegawai yang bekerja pada pemerintah tetapi belum berstatus PNS, seperti gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya.

b. Bunga :

Sesuai dengan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang, belanja bunga mengacu pada uang yang disisihkan untuk pembayaran bunga hutang yang dihitung berdasarkan jumlah pokok yang masih terhutang.

c. Subsidi :

Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada lembaga-lembaga tertentu dengan maksud untuk

menurunkan harga jual barang atau jasa yang diproduksi sehingga masyarakat umum dapat membelinya.

d. Hibah :

Alokasi anggaran untuk hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah dan organisasi masyarakat disebut sebagai belanja hibah. Perhibahan ini bersifat sukarela, tidak mengikat, memiliki tujuan tertentu, dan tidak diberikan secara terus menerus. Tata cara pemberian hibah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD, dan dana serta hasil hibah yang dihibahkan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam perjanjian hibah daerah.

e. Bantuan Sosial :

Belanja bantuan sosial merupakan pengalokasian anggaran untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial ini tidak diberikan secara kontinu setiap tahun anggaran, tetapi selektif dan memiliki ketentuan yang jelas mengenai penggunaannya.

f. Belanja Bagi Hasil : A N I R Y

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belanja bagi hasil adalah penggunaan anggaran untuk menyalurkan dana bagi hasil yang berasal dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kabupaten/kota kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya.

g. Bantuan Keuangan :

Pengalokasian anggaran bantuan keuangan umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dilakukan melalui belanja bantuan keuangan. Pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan daerah atau masyarakat penerima bantuan merupakan tujuan dari bantuan keuangan ini.

h. Belanja Tidak Terduga :

Belanja tidak terduga adalah penggunaan anggaran untuk mengatasi gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di daerah dalam tindakan tanggap darurat. Belanja ini, yang mencakup hal-hal seperti penanganan bencana alam dan bencana sosial yang tak terduga. Selain itu, pengembalian penerimaan lebih suatu daerah dari tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti sah juga termasuk dari bagian belanja ini.

Sementara itu, belanja langsung adalah semua pengeluaran yang di anggarkan secara langsung untuk pelaksanaan rencana dan kegiatan. Belanja langsung mencakup:

a. Belanja Pegawai :

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, biaya pegawai dapat berupa gaji atau honorarium.

b. Belanja Barang dan Jasa :

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang terkait dengan perolehan komoditas dengan nilai manfaat simpan kurang dari satu tahun atau penggunaan jasa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Hal ini mencakup, Penyewaan rumah, gedung, gudang, tempat parkir, fasilitas mobilitas, alat berat, perlengkapan kantor, pembelian atau pengadaan barang habis pakai, bahan atau material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan, percetakan atau penggandaan dokumen, seragam dinas, pakaian kerja, pakaian khusus untuk hari-hari tertentu, biaya makan dan minum, dan biaya pemulangan pegawai.

c. Belanja Modal :

Pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun aset tetap berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan untuk kegiatan pemerintahan disebut sebagai belanja modal. Aset tetap ini dapat berupa tanah, mesin, bangunan, jaringan, jalan raya, irigasi, dan aset tetap lainnya.

Belanja daerah dibagi menjadi tiga kategori berikut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi Pemerintah Daerah:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah biaya harian yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah yang memiliki hasil jangka pendek. Pengeluaran ini meliputi belanja pegawai, belanja produk, bunga, hibah, subsidi, dan bantuan sosial.

B. Belanja Modal

Menggunakan anggaran untuk membeli aset tetap dan aset lain yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi disebut sebagai belanja modal. Biaya ini termasuk belanja modal untuk pembelian tanah, bangunan, peralatan, dan aset tidak berwujud.

C. Belanja Tak Terduga

Pengeluaran anggaran untuk kejadian yang tidak biasa dan tidak diharapkan, seperti penanganan bencana alam, bencana sosial, atau pengeluaran lain yang tidak terduga yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau daerah, disebut dengan pengeluaran lain atau tidak terduga.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer terjadi ketika uang ditransfer dari satu entitas pelaporan ke yang lain, seperti ketika pemerintah pusat mengirimkan uang untuk dana perimbangan atau pemerintah daerah memberikan untuk dana bagi hasil.

Pembagian kelompok belanja berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 penggunaannya lebih difokuskan pada proses penganggaran, sedangkan Permendagri 64 Tahun 2013 lebih menekankan pada pelaporan. Kedua peraturan tersebut dapat berjalan bersama, namun pada tahap laporan harus dilakukan proses konversi kelompok belanja.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pendapatan yang diterima daerah melalui pemungutan dengan memperhatikan peraturan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan non-pajak dari usaha milik daerah, penerimaan investasi, dan pengelolaan sumber daya alam hanyalah sebagian kecil dari berbagai jenis pendapatan yang menghasilkan PAD. Pendapatan ini digunakan oleh daerah tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi keperluan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator yang berguna untuk menentukan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber dayanya sendiri. Oleh karena itu, jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dapat berkontribusi pada APBD

digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menjalankan perekonomian. Semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat, maka semakin besar kontribusi yang dapat diberikan PAD kepada APBD.

Menurut pendapat beberapa para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diterima suatu daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berasal dari bidang pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan perusahaan yang dimiliki daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah yang berasal dari daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 157, terdapat berbagai sumber pendapatan asli daerah, antara lain:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kewajiban memberikan kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang atau badan, bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dibayar tanpa menerima manfaat secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah bagi kesejahteraan rakyat.

Pajak daerah menurut Khusaini (2018) adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan ke daerah tanpa menerima keuntungan langsung yang sebanding. Mereka dapat

ditegakkan melalui peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk membiayai operasional pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah secara umum dibedakan menjadi dua kategori yaitu pajak daerah dan retribusi daerah:

- a. Berikut pembagian Pajak Daerah Provinsi:
 1. Pajak atas Kendaraan Bermotor;
 2. Bea atas Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 4. Pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah serta Air Permukaan;
 5. Pajak atas Rokok.
- b. Berikut pembagian Pajak Daerah Kabupaten/Kota:
 1. Pajak atas Hotel;
 2. Pajak atas Restoran;
 3. Pajak atas Hiburan;
 4. Pajak atas Reklame;
 5. Pajak atas Penerangan Jalan;
 6. Pajak atas Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
 7. Pajak atas Parkir;
 8. Pajak atas Air Tanah;
 9. Pajak atas Sarang Burung Walet;
 10. Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan;

11. Bea Atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah pajak yang wajib dibayarkan kepada daerah sebagai kompensasi atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sementara itu, wajib retribusi mengacu pada orang atau badan yang harus membayar biaya sesuai dengan undang-undang.

Menurut Khusaini (2018) Retribusi daerah adalah iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah secara wajib dan mendapatkan manfaat yang sebanding secara langsung. Dalam hal ini, pemaksaan bersifat ekonomis, yaitu mewajibkan pihak yang berkepentingan untuk membayar biaya izin tertentu agar mereka dapat memperoleh izin yang dipersyaratkan.

Retribusi daerah dapat dibagi menjadi tiga kategori menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:

a. Retribusi Atas Jasa Umum R Y

Retribusi atas jasa umum ialah yang ditawarkan oleh pemerintah daerah dengan tujuan melayani pemanfaatan umum, yang tersedia untuk individu atau badan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur berbagai retribusi jasa umum, antara lain:

1. Retribusi atas Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi atas Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
 3. Retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 4. Retribusi atas Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
 5. Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 6. Retribusi atas Pelayanan Pasar;
 7. Retribusi atas Pengujian Kendaraan Bermotor;
 8. Retribusi atas Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 9. Retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Peta;
 10. Retribusi atas Pengelolaan Limbah Cair;
 11. Retribusi atas Pelayanan Pendidikan;
 12. Retribusi atas Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 13. Retribusi atas Penyediaan dan Penyedotan Kakus;
 14. Retribusi atas Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi Atas Pelayanan Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan yang harus dibayar atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya swasta yang menyediakan jasa tersebut. Beberapa bentuk retribusi jasa usaha yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, antara lain sebagai berikut:

1. Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi atas Pasar Grosir dan Pertokoan;
3. Retribusi atas Tempat Pelelangan;
4. Retribusi atas Terminal;
5. Retribusi atas Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi atas Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa;
7. Retribusi atas Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi atas Pelayanan Kepelabuhan;
9. Retribusi atas Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi atas Penyeberangan Air;
11. Retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Atas Izin Tertentu

Pemerintah daerah memungut biaya perizinan tertentu dalam rangka memberikan pelayanan perizinan kepada individu atau badan dengan tujuan mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan. UU No. 28 Tahun 2009 mengatur beberapa jenis pembagian retribusi perizinan sebagai berikut:

1. Retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi atas Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi atas Izin Gangguan;
4. Retribusi atas Izin Trayek;
5. Retribusi atas Izin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Khusaini (2018), Aset daerah yang dipisahkan ialah termasuk dalam aset daerah yang dikelola dan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan kekayaan daerah secara tersendiri dipisahkan menjadi dua kategori yaitu pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan oleh daerah itu sendiri sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan partisipasi pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan dimasukkan ke dalam pendapatan asli daerah dan bersumber dari:

- a. Bagian dari laba yang dihasilkan dari penyertaan modal di daerah atau BUMD.
 - b. Bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada Negara atau BUMN.
 - c. Bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- ### 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan daerah lain yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dijelaskan secara rinci, antara lain:

1. Hasil penjualan atas kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, baik berupa pembayaran tunai maupun angsuran/cicilan;
2. Penerimaan atas jasa giro;
3. Pendapatan atas bunga;
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
5. Penerimaan atas komisi, potongan, atau bentuk lainnya yang diperoleh dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
6. Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, atau bentuk pembayaran lainnya dari hasil penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Menurut Setyarini (2015), pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain:

1. Fokus pada penyediaan fasilitas pelayanan publik dan barang publik yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan daya saing daerah.
2. Pembiayaan sektor atau bidang yang menjadi keunggulan atau andalan dalam perekonomian daerah, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
3. Pengembangan kelembagaan dan perbaikan mekanisme serta prosedur pengelolaan pembangunan untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan.

4. Peningkatan alokasi anggaran untuk pembiayaan pelayanan publik dan penyediaan barang publik, dibandingkan dengan pembiayaan operasional aparat pemerintah daerah dan DPRD.
5. Pembuatan peraturan daerah yang memberikan insentif bagi pelaku ekonomi, baik masyarakat lokal maupun investor eksternal, dalam menjalankan kegiatan usaha produktif di daerah.
6. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan jaminan perlindungan bagi dunia usaha melalui peraturan daerah yang sesuai.

Dengan melakukan langkah-langkah di atas, semoga pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD dan memajukan perekonomian daerah secara berkelanjutan.

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. DAU merupakan salah

satu komponen APBN yang digunakan untuk mendanai kebutuhan pokok suatu daerah.

Tujuan utama Dana Alokasi Umum adalah untuk mencapai alokasi kemampuan keuangan daerah yang adil untuk memberikan layanan dasar kepada masyarakat. DAU biasanya digunakan dalam konteks penerapan desentralisasi sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. DAU adalah jenis transfer tanpa syarat, yang mengacu pada transfer dana antar tingkatan pemerintahan yang tidak terkait dengan pengeluaran tertentu. Transfer dari pemerintah pusat yang dilakukan melalui DAU memainkan peran penting dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk menegakkan dan menjamin pencapaian standar pelayanan publik daerah.

2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima masing-masing daerah, antara lain:

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah yang menjadi alokasi dasar;
2. Jumlah penduduk yang daerah;
3. Luas daerah;
4. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap tahun;
5. Dana Bagi Hasil yang diterima setiap tahun.

2.3.2 Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari pendapatan bersih dalam negeri yang disetujui berdasarkan APBN;
2. Bobot urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Provinsi dan kabupaten/kota dibandingkan untuk menentukan proporsi DAU antara Provinsi dan kabupaten/kota;
3. Kompensasi antara 10 persen dan 90 persen digunakan untuk menentukan proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota;
4. APBN menghitung total DAU sebagaimana yang telah disebutkan pada poin satu.

2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan ke daerah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan setiap daerah. Hal ini berkaitan dengan

perimbangan keuangan dan wewenang pemerintah pusat untuk daerah.

Rafi dan Arza (2023) menjelaskan bahwa dana alokasi khusus adalah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan kepada daerah tertentu dengan maksud untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang akan menjadi kegiatan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. Alokasi khusus yang dibuat oleh pemerintah pusat berada di bawah kekuasaannya dan dirancang untuk daerah tertentu yang dipilih dalam tujuan khusus.

2.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Khusaini (2018), Dana Alokasi Khusus (DAK) dipengaruhi oleh 3 unsur, antara lain:

1. Daerah tertinggal masih sering dijumpai

Dalam kondisi di mana daerah belum memiliki cukup sumber daya untuk membiayai semua pengeluarannya, Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki peran penting dalam membiayai penyediaan infrastruktur fisik dan layanan masyarakat yang esensial. Dengan adanya DAK, memungkinkan suatu daerah untuk dapat mengatasi keterbatasan keuangan dan memastikan pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan dasar kepada masyarakat. DAK memberikan dukungan tambahan yang diperlukan oleh daerah untuk memastikan penyediaan

pelayanan dasar yang memadai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pemerataan Pembangunan yang belum merata

Dengan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK), pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal dapat dipercepat.

3. Pengangguran yang semakin banyak

Dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), ekonomi di perdesaan dapat lebih beragam, lebih produktif, dan memiliki lebih banyak pilihan lapangan kerja. Hal ini dapat dicapai dengan melaksanakan sejumlah tugas khusus dibidang infrastruktur, pertanian dan kelautan. Pemanfaatan DAK dimaksud untuk menurunkan tingkat pengangguran lokal.

2.4.2 Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus dihitung dalam dua langkah, yaitu:

1. Memutuskan apakah daerah akan menerima DAK;
2. Menghitung berapa alokasi DAK untuk masing-masing daerah.

Menurut Khusaini (2018), menjelaskan proses penetapan daerah mana yang dapat memenuhi kriteria seperti kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis, adalah sebagai berikut:

1. Kriteria umum dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang dilihat dari pendapatan APBD secara

keseluruhan setelah dikurangi biaya pegawai negeri sipil daerah.

2. Kriteria khusus yang diperhatikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan kekhasan daerah.
3. Kriteria teknis, dikembangkan sesuai berdasarkan indikator-indikator yang menawarkan gambaran umum infrastruktur dan fasilitas serta kemajuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

2.5 *Flypaper Effect*

Flypaper effect merupakan fenomena yang terjadi ketika pengeluaran yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tidak memberikan pengaruh yang sebanding dengan besarnya pendapatan asli daerah pemerintah daerah. Sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat tercermin dari *flypaper effect*. Hal ini disebabkan kebutuhan belanja daerah cenderung meningkat sementara jumlah dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh pemerintah daerah terbatas.

Ungkapan "*flypaper effect*" pertama kali digunakan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) untuk menggambarkan gagasan Arthur Okun bahwa "*money sticks where it hits*" yang pertama kali dikemukakannya pada tahun 1930. Ungkapan

"*flypaper effect*" digunakan tanpa terjemahan karena sampai saat ini belum ada padanan atau terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia. *Flypaper effect* adalah keadaan yang terjadi ketika pemerintah daerah memilih untuk menggunakan uang transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) daripada menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki oleh daerah itu sendiri untuk mengimbangi pengeluaran yang meningkat, Maimunah (2006).

Ketika pengeluaran terhadap transfer memiliki elastisitas yang lebih besar daripada pengeluaran terhadap pendapatan dari pajak daerah, maka akan terjadi fenomena yang dikenal sebagai *flypaper effect*. Pada fenomena ini transfer akan menambah pengeluaran pemerintah daerah lebih besar dari penerimaan transfer itu sendiri. *Flypaper effect* mencerminkan keadaan di mana transfer dari pemerintah pusat menghasilkan peningkatan besar dalam pengeluaran publik dibandingkan dengan penerimaan daerah.

Menurut Gorodnichenko (2011), fenomena *flypaper effect* dapat terwujud dalam dua bentuk: melalui peningkatan pajak daerah, pengeluaran belanja pemerintah yang berlebihan, atau pengeluaran untuk transfer yang lebih elastis daripada pengeluaran untuk pengumpulan pajak daerah.

Flypaper effect menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah cenderung meningkat lebih dari dana transfer

dan cenderung lebih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat daripada mengelola sumber daya lokal. Munculnya fenomena *flypaper effect* berdampak pada belanja daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Mengakibatkan kekurangan anggaran yang tidak akan pernah selesai.
2. Menggunakan sumber daya yang mendorong pertumbuhan PAD di daerah tanpa mencapai efisiensi yang optimal.
3. Menciptakan ketergantungan pada pemerintah pusat di daerah.
4. Pemanfaatan dana transfer ditanggapi secara berlebihan.
5. Akibatnya, Kabupaten/Kota tidak memiliki kemandirian finansial dan kemampuan daerah.

Menurut (Zulfan & Maulana, 2019) ada dua asumsi terjadinya *flypaper effect* yakni sebagai berikut:

1. DAU memiliki pengaruh (nilai koefisien) yang lebih besar terhadap Belanja Daerah dibandingkan PAD, dan kedua nilai tersebut signifikan; atau
2. PAD tidak berdampak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Flypaper effect atau yang disebut juga dengan kertas kerja layang adalah pemborosan belanja daerah yang terjadi ketika pemerintah daerah sering mengalokasikan lebih banyak belanja daerah dari dana transfer tanpa syarat (*unconditional grants*)

daripada pendapatan daerah mereka sendiri. Dalam kajian *flypaper effect*, terdapat dua aliran pemikiran ekonomi, yaitu:

1. Model birokratik (*bureaucratic model*): Menurut Kuncoro (2007), model birokrasi memberikan pengaruh yang lebih besar kepada birokrat dalam pengambilan keputusan publik, dan salah satu cara mereka menggunakan pengaruh ini adalah dengan mencoba memaksimalkan anggaran. Karena birokrat cenderung lebih suka membelanjakan pembayaran transfer daripada menaikkan pungutan pajak, model birokrasi juga menyoroti *flypaper effect*.
2. Model ilusi fiskal (*fiscal illusion model*): Ilusi fiskal terjadi ketika pembuat keputusan yang memiliki kewenangan dalam sebuah institusi menciptakan ilusi dalam penyusunan keuangan, yang mampu mengarahkan, mempengaruhi penilaian dan tindakan pihak lain. Dalam konteks ini, pemerintah daerah mungkin melakukan rekayasa anggaran agar dapat mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam hal pembayaran pajak atau retribusi, serta mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana dalam jumlah yang lebih besar. Jika terdapat respon yang asimetris terkait dengan penerimaan dan pengeluaran, ini dapat mengindikasikan terjadinya ilusi fiskal.

2.6 Teori Keagenan

Dengan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen, teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara prinsipal (pihak yang memberi mandat) dengan agen (pihak yang diberi mandat). Mereka memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri karena mereka adalah agen. Di sektor publik, di mana pemerintah daerah memiliki hubungan keagenan dengan pemerintah pusat, teori keagenan juga dapat dimanfaatkan. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengendalikan sendiri kegiatan pemerintahannya sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, namun pemerintah daerah juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemerintah pusat.

Dana perimbangan itulah yang akan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah (sebagai agen) kepada pemerintah pusat (sebagai prinsipal). Meskipun dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, namun pengelolaan keuangan merupakan salah satu mandat dari rakyat karena uang yang dimiliki pemerintah baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah seluruhnya adalah uang milik rakyat yang penggunaannya harus sampai untuk kepentingan rakyat itu sendiri, dan diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan daerahnya (Kurniati & Devi, 2022).

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disusun oleh satuan kerja, tim anggaran, dan legislatif seperti DPR yang kemudian membahas usulan rancangan APBD sehingga terjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Di sini terlihat jelas bahwa eksekutif dan legislatif memiliki hubungan berdasarkan teori keagenan, dengan eksekutif berperan sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal.

2.7 Pengaruh Antar Variabel Penelitian

2.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sejumlah uang yang dihasilkan oleh inisiatif daerah melalui diversifikasi sumber dan insentif keuangan. Menurut Rarung (2016), PAD berperan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menumbuhkan perekonomian daerah. PAD tidak sama untuk setiap daerah karena bergantung pada potensi daerah dan kemampuan pengelolaannya.

Menurut penelitian (Jannah Hilyatul, 2020) belanja daerah oleh pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memperhitungkan pendapatan daerah ketika menetapkan anggarannya untuk belanja daerah. Jumlah uang yang harus dikeluarkan melalui belanja daerah untuk melaksanakan

pemerintahan daerah meningkat berbanding lurus dengan jumlah pendapatan yang diterima melalui pendapatan asli daerah. Kemampuan daerah untuk merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan dana bergulir untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang diwujudkan dalam pendapatan asli daerah, ini merupakan penentu utama kemampuan daerah dalam menyediakan pembiayaan yang berasal dari daerah.

2.7.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan digunakan untuk mendistribusikan dana secara merata ke seluruh daerah. Untuk mencegah salah pengalokasian, penyaluran DAU ke daerah disesuaikan dengan keadaan dan potensi daerah. Untuk memperhatikan kebutuhan suatu daerah, dilakukan penentuan DAU (Zuwesty, 2016).

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki dampak yang cukup baik terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten atau kota di provinsi Jawa Timur, menurut penelitian dari (Jannah Hilyatul, 2020). Situasi ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah sering mengandalkan dukungan keuangan dari pemerintah pusat dan merencanakan peningkatan pengeluaran untuk membantu menghasilkan lebih banyak pendapatan. Pemerintah daerah

memilih mencari cara untuk meningkatkan dana alokasi umum sebagai sumber pendanaan peningkatan pelayanan masyarakat.

2.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi pemerataan sumber keuangan masing-masing daerah. Menurut Kusumawati dan Wiksuana (2018), DAK berperan dalam pembiayaan belanja modal pemerintah daerah yang setiap tahunnya akan meningkat dan secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

(Ikhwani Nurul, Naz'aina, 2019) menarik kesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki dampak positif yang menguntungkan dan cukup besar terhadap belanja daerah berdasarkan penelitiannya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah akan dipengaruhi oleh DAK yang lebih besar.

2.7.4 *Flypaper Effect* Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan penelitian Oktavia (2014), yang meneliti tentang fenomena *flypaper effect* di Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Menurut temuan penelitiannya, kabupaten dan kota di Jawa Timur secara umum mengalami dampak *flypaper effect* yang terdokumentasi dengan baik, karena penggunaan dana untuk

belanja daerah masih lebih tinggi menggunakan dana perimbangan. Tingkat ketergantungan pembiayaan belanja daerah kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan di daerah meningkat berbanding lurus dengan jumlah uang transfer (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Begitu pula penelitian yang dilakukan Abdullah dan Halim (2003) yang juga melakukan pengujian terkait adanya *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintahan kabupaten/Kota di pulau Jawa dan Bali. Dari penelitian yang dilakukan memperoleh hasil bahwa terjadi *flypaper effect* pada DAU periode t-1 terhadap belanja daerah periode t.

2.8 Penelitian Terkait

Beberapa hasil penelitian terkait yang menjadi referensi berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Vina, 2021) ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dan mengetahui apakah fenomena *flypaper effect* ini terjadi selama periode 2015-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan analisis regresi berganda metode yang digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli

Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan tidak terdapat *flypaper effect* terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten atau kota di Provinsi Kepulauan Riau. Persamaan variabel pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap belanja daerah. sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah tidak menggunakan variabel dana alokasi khusus yang menjadi tujuan penelitian ini berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Kustianingsih et al., 2022) melakukan penelitian yang berjudul “*Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Timur”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara empiris fenomena *flypaper effect* pada pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menganalisis 37 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dimana satu kabupaten/kota dikeluarkan dari sampel penelitian karena kekurangan data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap belanja daerah dan terjadi fenomena

flypaper effect di Provinsi Jawa Timur. Persamaan pada penelitian ialah sama-sama menggunakan variabel PAD dan DAU untuk mengetahui pengaruh terhadap belanja daerah. Namun bedanya dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Ikhwani Nurul, Naz'aina, 2019) melakukan penelitian yang berjudul “*Flypaper Effect* Pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Data Panel yaitu kombinasi data *cross section* dan *time series* menggunakan data penelitian pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2013 sampai 2018. Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara signifikan mempengaruhi belanja daerah. Kajian ini juga menjelaskan bahwa DAU kabupaten dan kota di Provinsi Aceh mengalami *flypaper effect*, namun pada DAK hanya mengalami *flypaper effect* di beberapa kabupaten dan kota saja. Hal ini terlihat dari kontribusi DAU dan DAK yang lebih besar dalam merespon belanja daerah

dibandingkan PAD. Persamaan pada penelitian ialah sama-sama menggunakan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sementara perbedaannya ialah terdapat pada tahun penelitian yang dilakukan.

4. Penelitian yang dilakukan (Armadani Fifi, 2022) berjudul “Analisis *Flypaper Effect* Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2019”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya fenomena *flypaper effect* serta pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian yang digunakan ialah data sekunder dengan metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat *flypaper effect* di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, dan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Persamaan ialah sama-sama menggunakan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu lokasi yang menjadi tujuan penelitian ini berbeda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Jannah Hilyatul, 2020), yang berjudul “Pengaruh *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah serta untuk mengetahui adanya fenomena *flypaper effect*. Data sekunder dan metode analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian memperlihatkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara PAD dan DAU terhadap belanja daerah. Kondisi ini mengindikasikan semakin tinggi tingkat PAD dan DAU akan semakin meningkatkan belanja daerah. Hasil pengujian juga ditemukan *flypaper effect*, yang mengindikasikan bahwa kebijakan belanja daerah lebih banyak dipengaruhi oleh DAU daripada PAD. Persamaannya ialah sama-sama menggunakan variabel PAD dan DAU sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah tidak menggunakan variabel DAK.
6. Penelitian oleh (Ardanareswari et al., 2019) yang berjudul “Fenomena *Flypaper Effect* pada Dana Bagi hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum serta pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Pulau Jawa Tahun 2013-2017”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara PAD, DAU dan DBH terhadap belanja daerah serta ingin melihat terjadi atau tidaknya fenomena *flypaper effect* pada belanja

daerah di Pulau Jawa Tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode analisis data panel. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah di Pulau Jawa tahun 2013-2017 dan berbanding terbalik dengan DAU dan DBH yang tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Selain itu, ditemukan terjadi *flypaper effect* terhadap belanja daerah yang bersumber dari DBH. Persamaannya adalah variabel yang digunakan menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sedangkan perbedaannya adalah menggunakan variabel Dana Bagi Hasil (DBH).

7. Kajian yang dilakukan oleh (Melda & Syofyan, 2020) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat”.. Selain menganalisis *flypaper effect* pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat, kajian ini berupaya mengetahui pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menganalisis dengan metode Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama menjelaskan bahwa secara parsial variabel DBH tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan

variabel DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Selain itu hasil pengujian menunjukkan adanya *flypaper effect* pada pemerintah kabupaten/kota Sumatera Barat yang dapat dilihat dari koefisien dana transfer lebih tinggi dibandingkan dengan koefisien pendapatan asli daerah. Persamaannya ialah sama-sama menggunakan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah sedangkan perbedaannya ialah menggunakan variabel dana bagi hasil dan juga lokasi penelitian yang menjadi salah satu pembanding pada penelitian ini.

8. Penelitian (Setiawan & Yogantara, 2022) yang berjudul “*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadi atau tidaknya *flypaper effect* dan pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan data sekunder. Berdasarkan temuan penelitian, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Bali tidak terjadi

fenomena *Flypper Effect*. Persamaannya yaitu menggunakan variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah, sedangkan perbedaannya ialah tempat lokasi yang diteliti.

9. Penelitian yang dilakukan oleh (Fadilah & Helmayunita, 2020) yang berjudul “Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah serta menganalisis fenomena *flypaper effect* pada pemerintah Provinsi Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan temuan tersebut, belanja daerah dengan signifikan dipengaruhi secara positif oleh DBH, PAD, dan DAU. Namun, DAK tidak berpengaruh Belanja Daerah. Koefisien PAD lebih rendah dari koefisien Dana Perimbangan yang mengartikan pada pemerintah provinsi di Indonesia telah terjadi *flypaper effect*. Persamaannya ialah sama-sama menggunakan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah, namun perbedaan menggunakan variabel dana bagi hasil dan juga lokasi penelitian yang menjadi salah satu pembanding pada penelitian ini.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Inayati dan Setiawan (2016) yang berjudul “Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *flypaper effect* dan bagaimana pengaruhnya terhadap belanja daerah kabupaten/Kota di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana belanja daerah dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah, berbeda dengan variabel Dana Alokasi Khusus yang tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Belanja daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil, dan pada penelitian ini nilai koefisien pendapatan asli daerah lebih tinggi dari nilai koefisien dana alokasi umum. Dalam hal belanja daerah, kabupaten/kota lebih mengandalkan Dana Alokasi Umum yang menunjukkan bahwa belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia terkena fenomena *flypaper effect*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan perbedaannya ialah tidak menggunakan variabel Dana Bagi Hasil.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Octaviana (2021) <i>Flypaper Effect</i> Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau.	PAD, DAU, DAK dan DBH, berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah serta terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.	Persamaan variabel pada penelitian ialah sama-sama menggunakan variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah untuk mengetahui pengaruh terhadap belanja daerah.	Perbedaannya adalah menggunakan variabel dana alokasi khusus yang menjadi tujuan penelitian berbeda. Dan tahun penelitian.
2	Kustianingsih, Andriana, dkk (2022) <i>Flypaper Effect</i> Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Timur.	Menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Dan terjadinya fenomena <i>flypaper effect</i> .	Persamaan variabel pada penelitian ialah sama-sama menggunakan variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum untuk mengetahui pengaruh terhadap belanja daerah	Perbedaannya yaitu lokasi yang menjadi tujuan penelitian ini berbeda. Dan tahun penelitian

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Ikhwani, Ratna, dkk (2019) <i>Flypaper Effect</i> Pada Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh.	Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, dan terjadi <i>flypaper effect</i> pada DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sedangkan pada DAK hanya terjadi <i>Flypaper effect</i> di sebagian Kabupaten/Kota saja.	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah.	Perbedaannya adalah tahun penelitian yang dilakukan.
4	Ardanareswari, dkk (2019) Fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada PAD,DAU dan DBH serta pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Pulau Jawa Tahun 2013-2017.	Secara parsial hanya PAD yang memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah sedangkan DAU dan DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah di Pulau Jawa. dan Terjadi <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah di Pulau Jawa tahun 2013-2017 yang bersumber dari DBH.	Persamaannya adalah variabel yang digunakan menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum	Perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel Dana Bagi Hasil (DBH).

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Jannah dan Kurnia (2020) Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.	Variabel PAD dan DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Hasil pengujian juga ditemukan <i>flypaper effect</i> , artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD.	Persamaannya ialah sama-sama menggunakan variabel PAD dan DAU.	Perbedaannya tidak menggunakan variabel DAK dan tahun penelitian.
6	Armadani dan Maryono (2022) Analisis <i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Daerah Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2019”.	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah serta terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.	Persamaannya ialah sama-sama menggunakan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagai variabel bebas.	Perbedaannya yaitu lokasi yang menjadi tujuan penelitian ini berbeda.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
7	Melda dan Syofyan (2020) Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	Secara parsial variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan variabel dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Serta menunjukkan bahwa terjadi <i>flypaper effect</i> pada pemerintah kabupaten/kota di sumatera barat.	Persamaannya ialah sama-sama menggunakan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah.	Perbedaannya ialah menggunakan variabel dana bagi hasil dan juga lokasi penelitian yang menjadi salah satu pembanding pada penelitian ini.
8	Setiawan dan Yogantara (2022), <i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah,	Persamaannya yaitu menggunakan variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah.	Perbedaan nya ialah tempat lokasi yang diteliti dan tahun penelitian.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dan tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i> di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.		
9	Fadilah dan Helmayunita (2020), Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia.	DAU, DBH dan PAD secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Koefisien Dana Perimbangan lebih besar dari koefisien PAD sehingga Terdapat <i>flypaper effect</i> pada pemerintah provinsi di Indonesia.	Persamaannya ialah sama-sama menggunakan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah.	Perbedaannya ialah menggunakan variabel dana bagi hasil dan juga lokasi penelitian yang menjadi salah satu pembanding pada penelitian ini.
10	Inayati dan Setiawan (2017) Fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia	Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus	Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.	Perbedaannya ialah tidak menggunakan variabel Dana Bagi Hasil.

Tabel 2.1 Lanjutan

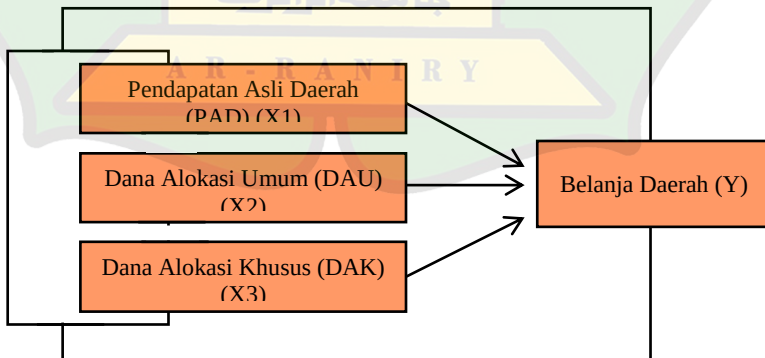
No	Peneliti, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Dan hasil pengujian mengindikasikan bahwa terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.		.

Sumber: Data diolah (2023)

2.9 Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang penelitian, landasan teori dan juga penelitian terkait maka kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran



2.10 Hipotesis

Dugaan awal untuk pengujian apakah benar atau tidak dengan cara melihat dari hasil analisis penelitian merupakan pengertian dari hipotesisi. Berikut hipotesis yang dikeluarkan pada penelitian yaitu:

H_{01} : Tidak ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

H_{a1} : Ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

H_{02} : Tidak ada pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

H_{a2} : Ada pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

H_{03} : Tidak ada pengaruh antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

H_{a3} : Ada pengaruh antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

- H_{04} : Tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H_{a4} : Ada pengaruh secara bersama-sama antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H_{05} : Tidak terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H_{a5} : Terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut Silaen (2018) desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian empiris dimana data yang diperoleh dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung (angka). Ruang lingkup penelitian ini dilakukan dengan mengamati Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh.

3.2 Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sekaran dan Bougie (2016), data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh sumber yang berbeda, kemudian digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder yang digunakan pada penelitian

ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Data Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah di Provinsi Aceh tahun 2018-2022 diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.

3.3 Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian ini dapat dijabarkan dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator
1.	Belanja Daerah (Y)	Kewajiban Daerah yang dicatat sebagai penurunan Nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran yang berlaku.
2.	Pendapatan Asli daerah (X1)	Penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah), yang diukur melalui besarnya sasaran PAD Kabupaten/Kota pada setiap tahun anggaran.

Tabel 3.1 Lanjutan

No	Variabel	Indikator
3.	Dana Alokasi Umum (X2)	Dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan atas alokasi dasar dan kesenjangan fiskal. Jumlah DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan didalam APBN.
4.	Dana Alokasi Khusus (X3)	Bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan disalurkan ke daerah tertentu untuk membiayai kegiatan khusus.

Sumber: Data Diolah (2023)

3.4 Metode dan Analisis

3.4.1 Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan data-data yang diuji dengan metode regresi data panel yaitu gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) (Basuki, 2017). Sifat *time series* terlihat dari diambilnya kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018-2022, sedangkan *cross section* terlihat dari data 23

kabupaten/kota yang dijadikan sebagai wilayah penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi data panel. Persamaan umum data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Persamaan tersebut diubah sebagai model estimasi data panel, yaitu:

$$BD_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + e_{it}$$

Dimana:

BD = Belanja Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

i = *Cross Section* (Kabupaten/Kota)

t = *Time Series* (Tahun)

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien pada masing-masing variabel bebas

ε = *Error term*

Teknik pengolahan data menggunakan program Eviews 10. Eviews merupakan program yang disajikan untuk analisis statistika dan ekonometrika. Eviews menyajikan perangkat analisis data, regresi dan peramalan. Eviews dapat digunakan untuk analisis dan evaluasi data ilmiah analisis keuangan, peramalan makro

ekonomi, simulasi, peramalan penjualan dan analisis biaya (Ajija, 2011).

Analisis data dengan metode regresi data panel harus mengikuti tahapan-tahapan tertentu untuk mengestimasi model yang sesuai. Ada tiga jenis pendekatan yang harus dilakukan, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*.

a. *Common Effect Model (CEM)*

Model CEM merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool*, dan menggunakan teknik kuadrat terkecil atau *least square* untuk mengestimasi koefisiennya.

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model FEM merupakan model yang mengasumsikan bahwa perbedaan antara unit dapat diketahui melalui perbedaan konstantanya. Pada model *fixed effect*, estimasi dapat dilakukan tanpa *no weighted* atau *Least Square Dummy Variabel (LSDV)* dan dengan *cross section weight* atau *Generalized Least Square (GLS)*.

c. *Random Effect Model (REM)*

Random effect model bertujuan untuk mengatasi kelemahan *fixed effect* yang menggunakan variabel semu, sehingga terjadi ketidakpastian dalam model. Ketika tidak terdapat variabel semu, maka *random effect* akan menggunakan residual, dengan asumsi memiliki hubungan antar waktu dan objek (Caraka & Yasin, 2017).

Model pendekatan REM digunakan untuk menghilangkan heteroskedastisitas pada model. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

3.4.2 Pengujian Model

Penentuan model regresi data panel yang sesuai dilakukan dengan pengujian penelitian ini yaitu:

1. Uji Chow

Uji chow merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan antara model *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model* yang paling tepat digunakan dalam estimasi model. Uji chow dapat dilakukan dengan uji restricted F-test. Dalam pengujian ini dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* lebih tepat dari pada *Fixed Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model* lebih tepat dari pada *Fixed Effect Model*

Pengujian ini mengikuti nilai probabilitas cross-section F. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (*cross-section F* > $\alpha = 0,05$), maka terima H_0 sehingga metode yang lebih baik digunakan adalah *common effect model (CEM)*, namun sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (*cross-section F* < $\alpha = 0,05$), maka tolak H_0 sehingga metode yang digunakan adalah *fixed effect model*.

2. Uji Hausman

Uji hausman adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang paling tepat digunakan. Adapun hipotesis untuk pemilihan dalam uji hausman, yaitu:

H_0 : *Random Effect Model* lebih tepat dari pada *Fixed Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model* lebih tepat dari pada *Random Effect Model*

Dasar penolakan hipotesis nol adalah dengan menggunakan pertimbangan nilai probabilitas chi square. Apabila nilai probabilitas chi square $< \alpha = 0,05$ maka tolak H_0 sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect* sedangkan ketika nilai probabilitas chi square $> \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima sehingga model yang digunakan adalah *random effect*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) bertujuan untuk membandingkan antara metode *common effects* dengan metode *random effects*. Langkah-langkah yang dilakukan dalam *Lagrange Multiplier-Test* adalah sebagai berikut:

- 1) Estimasi dengan Common Effect
- 2) Uji dengan menggunakan Lagrange Multiplier-Test

3) Melihat nilai probability F dan Chi-square dengan asumsi:

- a. Bila nilai probability F dan Chi-square $> \alpha = 0,05$, maka uji regresi panel data menggunakan model Common Effect.
- b. Bila nilai probability F dan Chi-square $< \alpha = 0,05$, maka uji regresi panel data menggunakan model Random Effect.

Atau dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Common Effect Model

H_a : Random Effect Model

Jika nilai probabilitas dalam uji Uji Lagrange Multiplier (LM) lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah model *random effect*. Sebaliknya jika nilai probabilitas dalam uji Uji Lagrange Multiplier (LM) lebih besar dari 0,05 maka H_a diterima.

3.5 Uji Hipotesis

3.5.1 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F merupakan suatu pengujian statistik secara keseluruhan (stimulant) variabel bebas terhadap variabel terikat. Melalui hasil uji-F dapat diketahui ada atau tidaknya variabel bebas yang masuk serta berpengaruh pada variabel terikat. Pengujian uji-

F dilakukan dengan menggunakan derajat signifikan nilai F. Kriteria pengujian simultan yaitu apabila F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} , maka secara bersamaan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila F_{hitung} lebih kecil dari pada F_{tabel} , maka antara variabel bebas dan variabel terikat secara bersamaan tidak mempengaruhi satu sama lain.

1. H_0 ditolak jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$
2. H_0 diterima jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai $sig > \alpha$

3.5.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Kriteria keputusannya adalah ketika nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} maka variabel bebas secara signifikan mempengaruhi variabel terikat. Sebaliknya, apabila nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} maka variabel bebas secara signifikan tidak mempengaruhi variabel terikat.

1. H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$
2. H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $sig > \alpha$

3.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan nilai dari adjusted R^2 menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel bebas dapat menggambarkan variasi variabel terikat. Nilai *adjusted* R^2 berada diantara 0 atau 1 (positif). Apabila nilai adjusted R^2 sama dengan nol maka disimpulkan bahwa variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Kemudian, apabila nilai *adjusted* R^2 sama dengan satu maka dapat disimpulkan bahwa variasi variabel terikat seluruhnya dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel bebas. Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat keberhasilan tersebut nilai adjusted R^2 harus mendekati nilai satu atau seratus persen.

1. Apabila nilai R^2 semakin mendekati 1, maka dapat disimpulkan variabel terikat secara keseluruhan dapat menjelaskan variabel bebas.
2. Apabila nilai R^2 semakin mendekati 0, maka dapat disimpulkan variabel terikat secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel bebas.

3.6 Penentuan Flypaper Effect

Asumsi penentuan terjadinya *Flypaper Effect* pada penelitian ini berfokus pada perbandingan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja

Daerah. Melo (2002) dalam Zulfan dan Maulana (2019) menyatakan bahwa *Flypaper Effect* terjadi apabila:

1. Pengaruh atau nilai koefisien Dau dan DAK terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja daerah, dan nilai keduanya signifikan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh atau respon PAD terhadap belanja daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi Flypaper Effect.

Jika pengaruh PAD (dilihat dari angka koefisien regresi variabel bebas PAD terhadap belanja daerah) lebih besar daripada DAU dan DAK (dilihat dari angka koefisien regresi variabel bebas DAU dan DAK terhadap belanja daerah) maka tidak terjadi *Flypaper Effect*. Sebaliknya, jika pengaruh PAD (dilihat dari angka koefisien regresi variabel bebas PAD terhadap belanja daerah) lebih kecil daripada DAU dan DAK (dilihat dari angka koefisien regresi variabel bebas DAU dan DAK terhadap belanja daerah) maka terjadi *Flypaper Effect*.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Aceh merupakan salah satu Daerah Istimewa di Provinsi Indonesia yang ibu kotanya terdapat di kota Banda Aceh. Aceh terletak di ujung bagian barat Pulau Sumatera dan Negara Indonesia dengan luas wilayah daerah mencapai 56.839 km². Batasan wilayah Aceh yaitu, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan dan 6.515 gampong/desa.

Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Aceh



Sumber: BPS Provinsi Aceh (diolah, 2023)

Jumlah Penduduk di Provinsi Aceh yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh (2023) pada tahun 2022 adalah sebanyak 5.407.855 jiwa yaitu jumlah penduduk laki-laki 2.715.386 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.692.469 jiwa. Dengan menggunakan 23 Kabupaten/Kota sebagai sampel, dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Aceh. Berikut tabel jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)
1	Kab. Aceh Barat	202,9
2	Kab. Aceh Besar	414,5
3	Kab. Aceh Selatan	237,4
4	Kab. Aceh Singkil	130,8
5	Kab. Aceh Tenggara	222,7
6	Kab. Aceh Tenggara	228,3
7	Kab. Aceh Timur	432,8
8	Kab. Aceh Utara	614,6
9	Kab. Bireuen	443,9
10	Kab. Pidie	444,5
11	Kab. Simeulue	94,9
12	Kota Banda Aceh	257,6
13	Kota Sabang	43,2
14	Kota Langsa	192,6

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)
15	Kota Lhokseumawe	191,4
16	Kab. Gayo Lues	103,1
17	Kab. Aceh Barat Daya	155,0
18	Kab. Aceh Jaya	96,0
19	Kab. Nagan Raya	173,4
20	Kab. Aceh Tamiang	301,5
21	Kab. Bener Meriah	168,7
22	Kab. Pidie Jaya	162,8
23	Kota Subulussalam	95,2
Aceh		5.407,9

Sumber: BPS Provinsi Aceh (diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diuraikan bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sebanyak 614,6 ribu jiwa dan Kota Sabang memiliki jumlah penduduk terendah yaitu sebanyak 43,2 juta jiwa di Aceh. Data-data penelitian seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang diperoleh dari BPKA dan BPS Provinsi Aceh akan diteliti hasilnya. Dalam penelitian tersebut adalah data Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus.

4.2 Deskripsi Penelitian

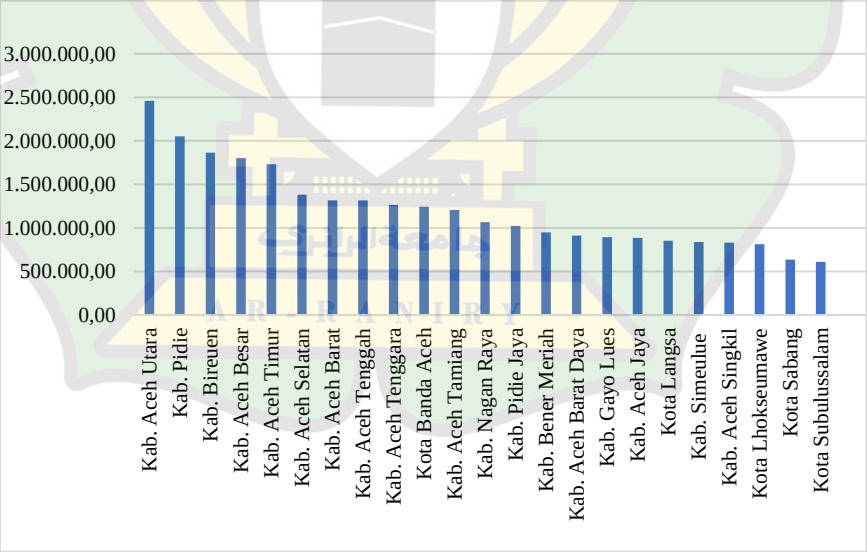
Penelitian ini menggunakan empat data, yaitu: Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Provinsi

Aceh Selama lima tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

4.2.1 Belanja Daerah

Perkembangan suatu daerah dapat dilihat dari belanja yang digunakan, dimana belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan kegiatan perekonomian yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Belanja daerah menjadi bagian penting dalam mengukur berhasil atau tidaknya pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang tersedia.

Gambar 4.2 Grafik Rata-Rata Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)



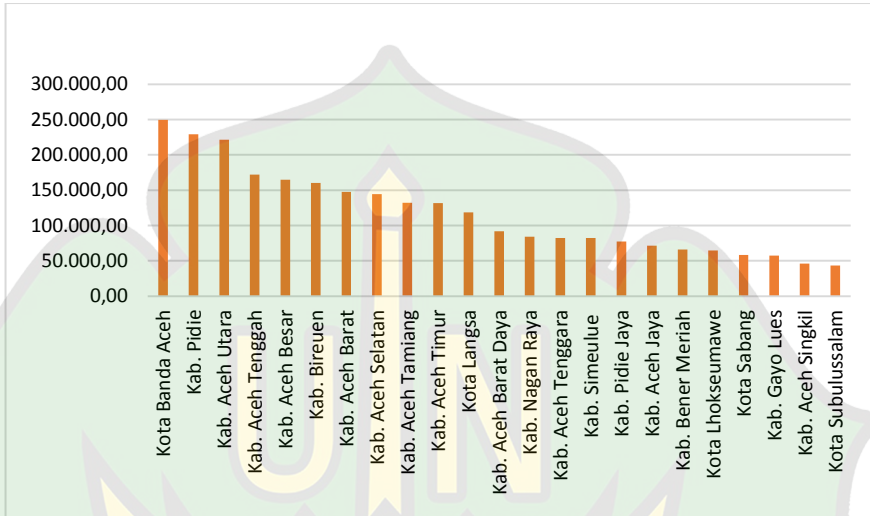
Sumber: BPKA Provinsi Aceh (diolah, 2023)

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah rata-rata Belanja Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir bervariasi, ada Belanja Daerah yang tinggi dan ada pula yang rendah. Terdapat tiga Kabupaten yang memiliki belanja daerah tertinggi yaitu Aceh Utara sebesar 2,46 triliun, Pidie sebesar 2,05 triliun dan Bireuen sebesar 1,86 triliun. Sementara Subulussalam menjadi Kota yang memiliki belanja daerah terendah sebesar 608,7 miliar rupiah dan juga Sabang sebesar 637,6 miliar rupiah, dimana angka ini jauh dibawah dari Kabupaten/Kota lainnya.

4.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah salah satu jenis pendapatan daerah atau pendapatan yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri (dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan perusahaan yang dimiliki oleh daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah) dan dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber dayanya dengan baik dapat dinilai dengan menggunakan indikator pendapatan asli daerah. Berikut data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota lima tahun terakhir di Provinsi Aceh:

Gambar 4.3 Grafik Rata-Rata Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPKA Provinsi Aceh (diolah, 2023)

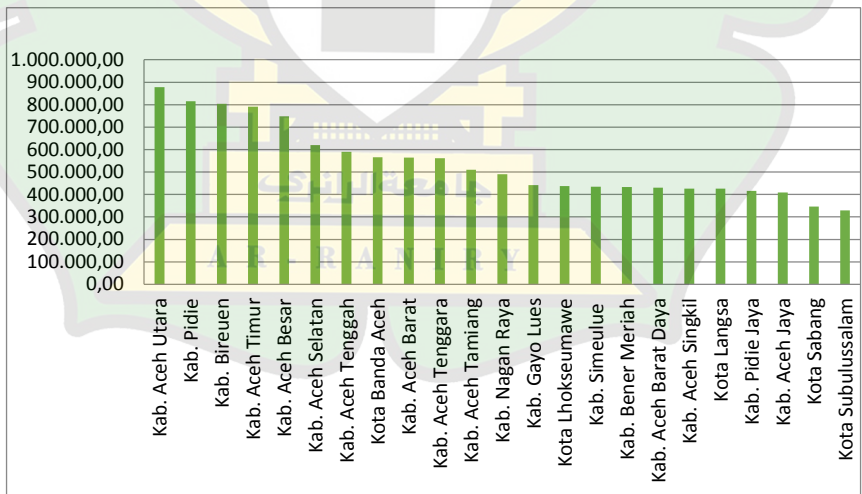
Berdasarkan Gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir bervariasi, ada Pendapatan asli daerah yang tinggi dan ada pula yang rendah. Terdapat tiga Kabupaten/Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu Banda Aceh sebesar 249,5 miliar rupiah, Pidie sebesar 229,1 miliar rupiah dan Aceh Utara sebesar 221,2 miliar rupiah. Sementara Subulussalam menjadi Kota yang memiliki pendapatan asli daerah terendah sebesar 43,1 miliar rupiah dan juga Aceh Singkil sebesar 46,2 miliar rupiah, dimana angka ini jauh dibawah dari Kabupaten/Kota lainnya.

Pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah terbesar di Provinsi Aceh. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah merupakan beberapa sumber pendapatan daerah Aceh.

4.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum yang digunakan untuk pemerataan pembangunan merupakan salah satu dana perimbangan yang disalurkan pemerintah kepada setiap daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir memiliki informasi sebagai berikut:

Gambar 4.4 Grafik Rata-rata Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPKA Provinsi Aceh (diolah,2023)

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa jumlah rata-rata Dana Alokasi Umum di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir bervariasi, ada Dana alokasi umum yang tinggi dan ada pula yang rendah. Terdapat tiga Kabupaten/Kota yang memiliki dana alokasi umum tertinggi yaitu Aceh Utara sebesar 878,4 miliar rupiah, Pidie sebesar 814,9 miliar rupiah dan Bireuen sebesar 803,5 miliar rupiah. Sementara Subulussalam menjadi Kota yang mendapat Dana Alokasi Umum terendah sebesar 329 miliar rupiah dan juga Kota Sabang sebesar 346,1 miliar rupiah, dimana angka ini jauh dibawah dari Kabupaten/Kota lainnya.

Transfer dana pemerintah pusat menurun pada tahun 2020 akibat dari *refocusing* anggaran dalam hal alokasi dan diperuntukkan untuk Dana Alokasi Umum, yang terkait dengan penanganan dampak COVID-19.

4.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Proses pendanaan seluruh kegiatan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dana alokasi khusus merupakan komponen dana pertimbangan yang dialokasikan ke daerah tertentu. Data DAK Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5 Grafik Rata-rata Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPKA Provinsi Aceh (diolah,2023)

Berdasarkan Gambar 4.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah rata-rata Dana Alokasi Khusus di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir bervariasi, ada Dana alokasi khusus yang tinggi dan ada pula yang rendah. Terdapat tiga Kabupaten yang memiliki dana alokasi khusus tertinggi yaitu Aceh Utara sebesar 393,1 miliar rupiah, Bireuen sebesar 266,1 miliar rupiah dan Pidie sebesar 253,2 miliar rupiah. Sementara Sabang menjadi Kabupaten yang mendapat Dana Alokasi Khusus terendah sebesar 89,4 miliar rupiah dan juga Kota Subulussalam sebesar 89,4 miliar rupiah, dimana angka ini jauh dibawah dari Kabupaten/Kota lainnya. Biasanya dana alokasi

husus digunakan untuk kepentingan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional.

Berikut Rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah pada Provinsi Aceh tahun 2018-2022.

Tabel 4.2
Rata-Rata Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Struktur APBD	Total Rata-Rata Realisasi
Belanja Daerah	Rp1.215.256,36,-
Pendapatan Asli Daerah	Rp117.214,28,-
Dana Alokasi Khusus	Rp54.021,87,-
Dana Alokasi Umum	Rp166.608,63,-

Sumber: BPKA Provinsi Aceh (diolah,2023)

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas menunjukkan jumlah rata-rata realisasi dana Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir, yaitu Belanja Daerah Aceh sebesar 1,2 triliun Pendapatan Asli Daerah sebesar 117,2 miliar rupiah Dana Alokasi Umum sebesar 542,1 miliar rupiah dan Dana Alokasi Khusus sebesar 166,6 miliar rupiah. Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa Aceh belum mandiri secara keseluruhan karena Aceh masih banyak menggunakan dana perimbangan untuk pembelanjaan daerah dibandingkan dengan dana yang dihasilkan oleh Aceh sendiri. Rata-rata dana pendapatan asli daerah Aceh dari tahun 2018-2022

jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dana perimbangan yang di transfer dari pemerintah pusat yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dapat diartikan bahwa Provinsi Aceh selama kurun waktu lima tahun telah terjadi fenomena *Flypaper Effect* yang mana Aceh lebih banyak merespon belanja daerah menggunakan dana transfer dari pusat dibandingkan dana yang dihasilkan oleh daerah Aceh sendiri.

4.3 Estimasi Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini digunakan tiga macam pendekatan untuk menganalisis dari pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, diantaranya yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Penentuan model terbaik dari ketiga pendekatan tersebut dapat dilakukan menggunakan uji *Goodness of Fit* yaitu *Chow Test*, *Hausman Test* dan Uji LM (*Lagrange Multiplier*).

4.3.1 Uji Chow

Uji Chow ini dapat dilakukan untuk memilih model estimasi mana yang lebih sesuai dan lebih baik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam regresi data panel. Dasar keputusan dengan membandingkan nilai *Cross-*

section F dan taraf signifikan ($\alpha = 0,05$). Hipotesis dalam uji chow yaitu:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Hasil *chow test* dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Chow

Uji Efek	Uji Statistik	Derajat kebebasan (d.f.)	Signifikansi
Cross-section F	10.199282	(22,89)	0.0000
Cross-section Chi-square	144.761263	22	0.0000

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2023)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa nilai Prob. *Cross-section F* sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05 (α) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya estimasi model data panel terbaik dalam penelitian menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) daripada menggunakan *Common Effect Model* (CEM).

4.3.2 Uji Hausman

Uji hausman ini dilakukan untuk memilih model estimasi yang lebih sesuai dan lebih baik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam regresi data panel. Dasar keputusan dengan membandingkan nilai *Cross-section random* dan taraf signifikan ($\alpha = 0,05$). Hipotesis dalam uji hausman yaitu:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Hasil uji hausman dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Hausman

Uji Ringkasan Tes	Hitung Statistik (Chi-Sq. Statistic)	Hitung Derajat Kebebasan (Chi-Sq. d.f.)	Signifikansi
Cross-section random	14.999322	3	0.0018

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2023)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai Prob. *Cross-section random* yaitu sebesar 0,0018 yang lebih kecil dari taraf signifikan ($\alpha = 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya estimasi model data panel terbaik dalam penelitian menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) daripada menggunakan *Random Effect Model* (REM).

4.4 Model Regresi Panel *Fixed Effect Model* (FEM)

Dalam estimasi regresi data panel, model yang terbaik terpilih setelah melakukan uji *Goodness of Fit* yaitu uji chow dan uji hausman adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Dimana, hasil pengolahan data menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil *Fixed Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Signifikansi
C	258288.5	186126.9	1.387701	0.1687
PAD	2.132390	0.317855	6.708680	0.0000
DAU	1.306877	0.331020	3.948026	0.0002
DAK	-0.001110	0.000668	-1.661426	0.1001
Spesifikasi Efek				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	62438.33	R-squared	0.982759	
Mean dependent var	1215256.	Adjusted R-squared	0.977916	
S.D. dependent var	477601.5	S.E. of regression	70974.97	
Akaike info criterion	25.37392	Sum squared resid	4.48E+11	
Schwarz criterion	25.99451	Log likelihood	-1433.000	
Hannan-Quinn criter.	25.62582	F-statistik	202.9237	
Durbin-Watson stat	2.064057	Prob(F-statistik)	0.000000	

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2023)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas bentuk persamaan pada model regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM), dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$BD = 258288.5 + 2.132390PAD + 1.306877DAU - 0.001110DAK + \varepsilon_i$$

Keterangan:

- BD : Belanja Daerah
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 DAU : Dana Alokasi Umum
 DAK : Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apabila selama periode 2018-2022 pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus diasumsikan tetap, maka belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh selama periode penelitian akan meningkat sebesar 258,288,5 miliar rupiah, artinya dengan adanya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dapat meningkatkan belanja daerah. Kondisi ini terjadi dengan memperhitungkan seluruh variabel penelitian secara bersama-sama.
2. Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,132390 artinya jika setiap penambahan pendapatan asli daerah sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh sebesar 2,132390 miliar rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh selama periode 2018-2022.
3. Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,306877 artinya jika setiap penambahan dana alokasi umum sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh sebesar 1,306877 miliar rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. Dana alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap

belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh selama periode 2018-2022.

4. Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar $-0,001110$ artinya jika setiap penambahan dana alokasi khusus sebesar 1 persen, maka akan menurunkan belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh sebesar $0,001110$ miliar rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. Dana alokasi khusus memiliki pengaruh negatif terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh selama periode 2018-2022.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independent yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap variabel dependent yaitu belanja daerah. Berikut merupakan tabel hasil uji T:

Tabel 4.6
Hasil Uji T

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Signifikansi
C	258288.5	186126.9	1.387701	0.1687
PAD	2.132390	0.317855	6.708680	0.0000
DAU	1.306877	0.331020	3.948026	0.0002
DAK	-0.001110	0.000668	-1.661426	0.1001

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2023)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa, nilai koefisien pada variabel X_1 yaitu Pendapatan Asli daerah sebesar

2,132390 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 (α) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli daerah dengan Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2018-2022. Dimana memiliki nilai koefisien bernilai positif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif.

Variabel X_2 yaitu Dana Alokasi Umum, nilai koefisiennya sebesar 1.306877 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0002 lebih kecil dari 0,05 (α) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2018-2022. Dimana memiliki nilai koefisien bernilai positif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif.

Variabel X_3 Dana Alokasi Khusus, nilai koefisien sebesar - 0,001110 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,1001 lebih besar dari 0,05 (α) artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2018-2022. Dimana, dengan memiliki nilai koefisien bernilai negatif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh negatif.

4.5.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel independent yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependent yaitu Belanja daerah. Berikut merupakan tabel dari hasil uji F:

Tabel 4.7
Hasil Uji F

F-statistik	202.9237
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2023)

Pada Tabel 4.7 di atas diperoleh nilai $F = 202.9237$ dengan $Prob = 0.000000$ lebih kecil dari $0,05 (\alpha)$ maka menolak H_0 dan menerima H_1 , artinya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama mampu mempengaruhi Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2018-2022.

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk melihat besarnya persentase variasi variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel bebasnya. Berikut tabel hasil uji koefisien determinasi (R^2):

Tabel 4.8
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.982759
Adjusted R-squared	0.977916

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2023)

Pada Tabel 4.8 di atas diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,977916 atau 97,7916%, artinya model ini mampu menjelaskan pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah variabel sebesar 97,7916%. Sementara sisanya sebesar 2,2084% dijelaskan diluar model dalam penelitian.

4.6 Pengujian *Flypaper Effect*

Untuk melihat *Flypaper Effect* pada 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh dapat kita lihat dari nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam merespon Belanja Daerah. Menurut Zulfan & Maulana (2019) Pengujian estimasi dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kedalam dua model persamaan yakni:

$$\mathbf{BD = f (PAD \text{ dan } DAU)}$$

Model diatas dijabarkan dengan tinjauan pada pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah. Sesuai dengan cara mengidentifikasi *flypaper effect*, yakni apabila koefisien DAU terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan koefisien PAD maka Kabupaten/Kota Provinsi Aceh masih memiliki ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dalam Dana Alokasi Umum. Dan model yang kedua, yakni sebagai berikut

$$\mathbf{BD = f (PAD \text{ dan } DAK)}$$

Model diatas dikembangkan dengan tinjauan pada pengaruh PAD dan DAK terhadap belanja daerah. Apabila koefisien DAK terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan koefisien PAD maka Kabupaten/Kota Provinsi Aceh masih memiliki ketergantungan pada Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan hasil pengujian selama periode 2018-2023, daerah-daerah yang mengalami *Flypaper Effect* dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Hasil Pengujian *Flypaper Effect* Pada DAU 23
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Kabupaten/Kota	Tinjauan <i>Flypaper Effect</i>
	Model 1 (Ukuran DAU)
Kab. Aceh Barat	<i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Besar	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Selatan	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Singkil	<i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Tenggara	<i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Timur	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Utara	<i>Flypaper Effect</i>
Kab. Bireuen	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Pidie	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Simeulue	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kota Banda Aceh	<i>Flypaper Effect</i>
Kota Sabang	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kota Langsa	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kota Lhokseumawe	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Gayo Lues	<i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Barat Daya	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Jaya	<i>Flypaper Effect</i>
Kab. Nagan Raya	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Tamiang	<i>Flypaper Effect</i>

Tabel 4.9 Lanjutan

Kabupaten/Kota	Tinjauan <i>Flypaper Effect</i>
	Model 1 (Ukuran DAU)
Kab. Bener Meriah	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Pidie Jaya	<i>Flypaper Effect</i>
Kota Subulussalam	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2023)

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil pengujian diatas, perbandingan DAU dan PAD untuk melihat *flypaper effect* pada 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh ada sepuluh Kabupaten/Kota yang memiliki koefisien DAU lebih besar dibandingkan koefisien PAD dalam merespon belanja daerah atau mengalami *flypaper effect* yaitu pada Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Tamiang dan Kab. Pidie Jaya. Dapat diartikan bahwa sepuluh Kabupaten/Kota tersebut lebih banyak menggunakan dana dari Dana Alokasi Umum dibandingkan dana dari Pendapatan Asli daerah dalam Belanja Daerah.

Tabel 4.10
Hasil Pengujian *Flypaper Effect* Pada DAK 23
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Kabupaten/Kota	Tinjauan <i>Flypaper Effect</i>
	Model 2 (Ukuran DAK)
Kab. Aceh Barat	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Besar	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Selatan	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Singkil	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Tenggara	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>

Tabel 4.10 Lanjutan

Kabupaten/Kota	Tinjauan <i>Flypaper Effect</i>
	Model 2 (Ukuran DAK)
Kab. Aceh Tenggara	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Timur	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Utara	<i>Flypaper Effect</i>
Kab. Bireuen	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Pidie	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Simeulue	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kota Banda Aceh	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kota Sabang	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kota Langsa	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kota Lhokseumawe	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Gayo Lues	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Barat Daya	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Jaya	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Nagan Raya	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Aceh Tamiang	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Bener Meriah	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kab. Pidie Jaya	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>
Kota Subulussalam	Tidak terjadi <i>Flypaper Effect</i>

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2023)

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas perbandingan antara DAK dan PAD, hanya ada satu kabupaten/kota yang memiliki koefisien DAK lebih tinggi dibandingkan koefisien PAD yaitu pada kabupaten Aceh Utara, hal ini menunjukkan bahwa hanya DAK Kabupaten Aceh Utara yang merespon belanja daerah lebih tinggi dibandingkan dengan PAD. Dapat diartikan dalam kurun waktu lima tahun dari 2018-2022 hanya Kabupaten Aceh Utara yang lebih banyak menggunakan dana dari Dana Alokasi Khusus dibandingkan dana dari Pendapatan Asli daerah dalam Belanja Daerah sehingga terjadi *flypaper effect*. Pada 22 Kabupaten/kota

lainnya memiliki koefisien DAK lebih rendah dibandingkan koefisien PAD dalam merespon belanja, maka dapat disimpulkan 22 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tidak terjadi *Flypaper Effect*.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil pengolahan data yang telah peneliti uraikan di atas, maka pada sub bab ini peneliti akan menganalisis berdasarkan data yang telah dianalisa sebelumnya dengan menggunakan program Eviews 12.

4.7.1 Pengaruh Pendapapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2022. Dengan begitu hipotesis pertama yang menyatakan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh diterima. Hal ini karena pada tingkat signifikan PAD sebesar 0.000 lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Kustianingsih et al., 2022) yang menemukan bahwa PAD secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, maka belanja daerah juga meningkat. Kemampuan suatu daerah untuk menggali pendapatan asli daerah

yang akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhannya. Ketergantungan suatu daerah pada dukungan keuangan dari pemerintah pusat berkurang karena bagian dari pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanjanya meningkat.

Besarnya investasi terhadap suatu daerah dapat dipengaruhi secara positif oleh PAD dari sumber yang sah seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain PAD sah lainnya. Dengan memanfaatkan PAD dengan maksimal sebagai sumber pendapatan daerah yang akan membiayai belanja modal pemerintah daerah, akan mampu menarik investor dan pada akhirnya meningkatkan PAD daerah. Daerah dengan PAD yang tinggi, sudah dapat dikatakan daerah yang mandiri dan mampu memaksimalkan potensi-potensi dalam menambahkan kas di daerah. Dalam keadaan seperti ini, belanja daerah diperlukan untuk mewujudkan potensi daerah dan menghimpun dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur terkait dengan pertumbuhan PAD (Ikhwani Nurul, Naz'aina, 2019).

Hal ini sejalan dengan pendapat pada teori yang dikemukakan oleh Wagner pada abad ke-19, bahwa dalam perekonomian, ketika pendapatan per kapita meningkat dalam suatu perekonomian, maka pengeluaran pemerintah juga ikut meningkat. PAD yang merupakan sumber pendapatan dari daerah itu sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. PAD juga merupakan

salah satu sumber belanja daerah, maka peningkatan PAD akan meningkatkan dengan baik dana pemerintah daerah maupun tingkat kemandiriannya, sehingga akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja daerahnya guna melengkapi infrastruktur yang ada untuk pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik yang suatu saat akan meningkatkan PAD. Oleh karena itu, jika PAD meningkat, maka belanja daerah juga akan meningkat.

4.7.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

DAU memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat daerah. Melalui transfer dana ini, pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan di seluruh daerah. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, tahun 2018 sampai dengan 2022. Dengan demikian, disepakati bahwa hipotesis kedua yang menyatakan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh diterima. Hal ini dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$, nilai dari signifikansi DAU, lebih kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh (Jannah Hilyatul, 2020) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa, semakin besar Dana Alokasi Umum, semakin banyak pula pengeluaran yang akan meningkat di suatu daerah, dan dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan menganggarkan peningkatan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perda dalam upaya meningkatkan pendapatan.

4.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dipengaruhi oleh beberapa unsur yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, kerjasama atau koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keadaan eksternal yang dapat berdampak pada belanja daerah. Berdasarkan hasil pengujian statistik, menunjukkan bahwa Variabel DAK bernilai negatif, yang menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara variabel DAK dengan belanja daerah, selain itu, tingkat signifikan DAK sebesar 0.1001 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ferdiansyah, dkk. (2018) mendukung temuan penelitian ini, yang menunjukkan bahwa DAK tidak DAK tidak

berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ditolak.

Data Penelitian menunjukkan adanya fluktuasi pada penerimaan DAK dari tahun 2018-2022. Penurunan penerimaan DAK yang signifikan pada sejumlah kabupaten/kota terjadi pada tahun 2020. Pada kebanyakan kabupaten/kota di Provinsi Aceh penurunan DAK terjadi apabila pada tahun yang sama pengeluaran belanja meningkat. Peningkatan belanja daerah yang besar akan berdampak pada turunnya penerimaan DAK. Hal ini membuktikan hubungan antara DAK dan belanja daerah adalah berlawanan dan pengaruhnya tersebut signifikan. Penurunan DAK dapat disebabkan oleh realisasi penyerapan DAK yang tidak mencapai seratus persen. Artinya tidak menggunakan dana yang sudah dicairkan secara keseluruhan dengan semaksimal mungkin. Alasan lainnya adalah penggunaan PAD dan DAU untuk menutupi kekurangan dana akibat penurunan penerimaan DAK (Amalia Wia Rizki, Nor Wahyudin, 2015). DAK memiliki tujuan untuk mendukung program-program nasional di daerah, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan lingkungan. Setiap daerah memiliki hak untuk menggunakan DAK sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan peningkatan daerahnya sendiri.

4.7.4 Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dalam mempengaruhi belanja daerah, koefisien DAU dan DAK jauh lebih besar daripada koefisien PAD. Temuan ini menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di provinsi Aceh terjadi *flypaper effect*, yang berarti bahwa kabupaten dan kota di Aceh terus menggunakan uang transfer pusat lebih sering daripada dana yang dihasilkan oleh daerah mereka sendiri. Dilihat dari hasil per daerah, DAU merespon belanja daerah lebih tinggi dibandingkan dengan PAD, artinya terjadi *flypaper effect* untuk 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, sedangkan pada perbandingan DAK dengan koefisien PAD juga terjadi fenomena *flypaper effect* hanya di kabupaten Aceh Utara.

Dari hasil diatas bisa didefinisikan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh belum mandiri dalam menjalankan roda perekonomiannya, karena pengeluaran daerah lebih banyak didukung dari pendapatan yang diberikan oleh pusat dibandingkan pendapatan daerahnya sendiri. Dengan dana yang telah disediakan oleh pemerintah pusat, daerah merasa nyaman dan tidak lagi memikirkan secara optimal bagaimana daerahnya sendiri juga bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Dengan begitu akan menimbulkan ketergantungan suatu daerah akan dana pusat

yang membuat mereka tidak mandiri secara finansial dan inilah yang membuat daerah tersebut dikategorikan sebagai *flypaper effect* (Ikhwani dkk, 2019).

Kondisi *flypaper effect* jelas mempersulit pelaksanaan otonomi daerah. Karena masih besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Padahal pencapaian otonomi daerah dari pemerintah pusat yaitu mandiri tanpa ketergantungan adalah tujuan utama otonomi daerah. Otonomi daerah kemungkinan akan gagal jika kondisi ini terus berlanjut. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2016) yang menyimpulkan bahwa terdapat *flypaper effect* pada dampak DAU dan PAD terhadap belanja daerah.

Jika dana perimbangan diprosikan dengan DAU, maka sebagian kabupaten/kota di Aceh akan mengalami *flypaper effect*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian daerah di Aceh cenderung mengandalkan DAU untuk membiayai belanja modal dibandingkan dengan PAD. DAU sendiri sering digunakan untuk pegawai dan merupakan salah satu pos belanja daerah. Namun, jika DAU lebih banyak digunakan untuk pembangunan daerah, maka hal ini akan membuat pemerintah daerah/kota Aceh bergantung pada dana pusat sehingga menyebabkan pemerintah daerah melupakan potensi daerah yang berakibat pada terus menurunnya PAD. Hal ini tentu saja mengarah pada kemandirian daerah, dan sebab dari *flypaper effect* pada DAU yang terjadi di beberapa

wilayah, yaitu Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Tamiang dan Kab. Pidie Jaya.

Selanjutnya, *flypaper effect* yang digunakan untuk membandingkan DAK dan PAD hanya terjadi di Kabupaten Aceh Utara, ini menunjukkan bahwa hanya sedikit daerah di Aceh yang sangat bergantung pada DAK daripada PAD. DAK umumnya lebih banyak digunakan untuk kegiatan khusus yang mengutamakan prioritas nasional agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada DAK (sebagai proksi pendanaan perimbangan). Itu sebabnya *flypaper effect* pada DAK hanya terjadi di satu kabupaten.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut dari penelitian yang dilakukan:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Nilai koefisien regresi sebesar 2,132 dan nilai t hitung sebesar 6,708 yang mana lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,981 atau signifikansi ($0,0000 < 0,05$).
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Nilai koefisien regresi sebesar 1,306 dan nilai t hitung sebesar 3,948 yang mana lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,981 atau signifikansi ($0,0002 < 0,05$).
3. Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2022. Nilai koefisien regresi sebesar -0,001 dan nilai t

hitung sebesar -1,661 yang mana lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 1,981 atau signifikansi ($0,1001 > 0,05$).

4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama mampu mempengaruhi belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nilai f hitung sebesar 202,9 yang mana lebih besar dari nilai f tabel yaitu 2,686 atau signifikansi ($0,000 < 0,05$).
5. Pengaruh tingkat koefisien DAU dan DAK terhadap belanja daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat koefisien PAD. Hasil ini membuktikan bahwa kabupaten/kota di Aceh mengalami *flypaper effect*, artinya kabupaten/kota di Aceh masih lebih banyak menggunakan dana transfer pusat dibandingkan dengan dana yang dihasilkan di daerah. Untuk hasil perdaerah, DAU memiliki respon belanja daerah yang lebih tinggi dibandingkan PAD, artinya *flypaper effect* terjadi di 10 kabupaten/kota di Aceh, sedangkan pada perbandingan DAK dengan koefisien PAD juga terjadi fenomena *flypaper effect* hanya di kabupaten Aceh Utara, 22 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh tidak terjadi *flypaper effect*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh diharapkan mampu menggali lebih banyak lagi potensi-potensi yang ada di daerah supaya menghasilkan dana dari pendapatan asli daerah langsung yang akan menjadi sumber dana utama dalam pembiayaan belanja daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan Belanja Daerah. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan tahun data terbaru dan dapat meperluas rentan waktu penelitian dan baik menggunakan indikator yang sama maupun indikator yang berbeda sehingga dapat berkembang penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukriy, A. H. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI, Yogyakarta*, 1140–1159.
- Amalia Wia Rizki, Nor Wahyudin, N. M. (2015). Flypaper effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 1–12.
- Aprilia, N., & Saputra, A. (2013). Pengaruh Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 107–131.
- Ardanareswari, S., Lorentino,), Laut, T., & Destiningsih, R. (2019). Fenomena Flypaper Effect Pada PAD, DAU dan DBH serta Pengaruhnya terhadap Belanja daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013-2017. *Directory Journal of Economic*, 1(4), 479–494.
- Armadani Fifi, M. (2022). Analisis flypaper effect pada belanja daerah pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2908–2915.
- Basuki, Agus. T., dan Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Caraka, R. E., & Yasin, H. (2017). *Spatial Data Panel*.
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypapaer effect pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 2).
- Ikhwani Nurul, Naz'aina, R. (2019). Iypaper Rffect pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Manajemen Indonesia (J-MIND)*, 4(No.2), 111–123.

- Inayati, N, I., Setiawan, D. (2016). Fenomena Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 220–239.
- Jannah Hilyatul, H. (2020). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (STIESIA) Surabaya. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(12), 1–19.
- Khusaini, M. (2018). Malang: UB Press. In *Keuangan Daerah*.
- Kuncoro, H. (2007). Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X, UNHAS Makasar, 26-28 Juli 2007*.
- Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(2), 187. <https://doi.org/10.30736/jes.v7i2.365>
- Kustianingsih, N., Andriana., & Ari Wardhaningrum, O. (2022). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Published by Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung*, 8(1), 58–70.
- Kusumawati, Lily dan Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud.*, 7(5).
- Maimunah, M. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang*.
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera barat. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2 (2).
- Melo, L. (2002). The flypaper effect under different institutional

- contexts: The Colombian Case. *Public Choice*, 111 (3-4), 317-345.
- MS, M. Z. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 180. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.18>
- Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 43–59.
- Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 411–427.
- Setiawan, M. P., & Yogantara, K. K. (2022). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. In *Journal Research of Accounting (JARAC)* 4(1).
- Silaen, S. (2018). Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, In Media, Bandung.
- Vina, O. (2021). Flypaper effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(4), 43–55.
- Zulfan, T., & Maulana, H. (2019). Gejala Fly Paper Effect Di Provinsi Aceh Ditinjau dari Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. *Inovasi*, 15(2), 188–197.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun	BD	PAD	DAU	DAK
1	Kab. Aceh Barat	2018	1,216,330.09	150,499.04	570,763.54	180,969.63
2	Kab. Aceh Barat	2019	1,366,760.77	153,799.29	588,209.48	185,814.62
3	Kab. Aceh Barat	2020	1,330,251.97	149,925.45	553,850.56	153,998.62
4	Kab. Aceh Barat	2021	1,343,673.32	134,641.23	561,819.53	217,512.07
5	Kab. Aceh Barat	2022	1,327,817.31	148,771.82	543,825.94	164,080.00
6	Kab. Aceh Besar	2018	1,724,010.07	161,160.84	713,344.62	198,391.15
7	Kab. Aceh Besar	2019	1,841,600.70	169,896.99	751,399.71	244,970.92
8	Kab. Aceh Besar	2020	1,910,394.12	188,775.26	759,179.35	211,898.41
9	Kab. Aceh Besar	2021	1,891,445.77	168,823.93	771,619.30	246,346.00
10	Kab. Aceh Besar	2022	1,637,896.71	134,278.83	744,913.61	182,279.43
11	Kab. Aceh Selatan	2018	1,353,576.31	152,071.79	634,654.63	315,285.37
12	Kab. Aceh Selatan	2019	1,481,264.80	139,976.61	653,415.19	264,913.50
13	Kab. Aceh Selatan	2020	1,376,079.29	134,381.48	603,242.25	197,760.19
14	Kab. Aceh Selatan	2021	1,335,001.27	132,246.45	615,381.71	244,379.01
15	Kab. Aceh Selatan	2022	1,368,004.73	162,463.18	594,752.00	207,641.93
16	Kab. Aceh Singkil	2018	742,719.61	45,289.51	440,493.15	119,272,244
17	Kab. Aceh Singkil	2019	887,686.08	45,264.58	454,078.75	113,317.18
18	Kab. Aceh Singkil	2020	806,472.54	46,166.27	409,538.54	126,487.38
19	Kab. Aceh Singkil	2021	889,251.39	52,823.03	419,635.76	186,402.96
20	Kab. Aceh Singkil	2022	834,203.09	41,557.70	407,073.54	153,670.00

21	Kab. Aceh Tenggara	2018	1,233,195.34	169,638.50	603,737.49	210,625.70
22	Kab. Aceh Tenggara	2019	1,385,661.70	170,961.16	623,701.92	184,505.40
23	Kab. Aceh Tenggara	2020	1,387,140.45	193,589.82	572,047.24	170,324.49
24	Kab. Aceh Tenggara	2021	1,351,018.82	165,060.98	584,064.49	182,277.51
25	Kab. Aceh Tenggara	2022	1,217,471.65	162,128.01	565,665.42	155,850.00
26	Kab. Aceh Tenggara	2018	1,183,205.76	80,263.47	580,439.18	151,157.75
27	Kab. Aceh Tenggara	2019	1,350,619.78	117,628.92	602,160.37	172,052.51
28	Kab. Aceh Tenggara	2020	1,326,679.15	98,346.79	546,649.27	189,229.95
29	Kab. Aceh Tenggara	2021	1,274,693.63	81,385.17	539,367.76	191,413.84
30	Kab. Aceh Tenggara	2022	1,189,685.77	34,981.63	537,226.53	132,501.44
31	Kab. Aceh Timur	2018	1,431,005.09	51,718.82	783,130.01	188,672.22
32	Kab. Aceh Timur	2019	1,977,093.63	185,148.02	819,436.04	238,991.62
33	Kab. Aceh Timur	2020	1,790,134.67	198,202.80	769,038.91	180,804.75
34	Kab. Aceh Timur	2021	1,838,593.60	122,378.73	784,643.93	257,763.25
35	Kab. Aceh Timur	2022	1,631,465.12	101,374.93	801,853.93	152,791.46
36	Kab. Aceh Utara	2018	2,250,884.30	229,541.21	835,915.56	368,966.29
37	Kab. Aceh Utara	2019	2,636,894.39	280,140.41	893,015.39	444,119.79
38	Kab. Aceh Utara	2020	2,518,460.03	226,828.86	897,980.13	375,269.15
39	Kab. Aceh Utara	2021	2,398,339.82	178,917.30	882,657.78	343,440.05
40	Kab. Aceh Utara	2022	2,500,842.40	190,943.22	882,657.78	433,920.00
41	Kab. Bireuen	2018	1,761,174.17	179,476.24	781,884.22	265,371.92
42	Kab. Bireuen	2019	1,926,156.61	156,528.83	817,988.85	275,164.67
43	Kab. Bireuen	2020	1,888,989.86	162,162.62	815,284.27	214,635.56
44	Kab. Bireuen	2021	1,963,840.35	173,287.82	801,251.15	290,934.75
45	Kab. Bireuen	2022	1,775,543.34	129,096.53	801,251.15	284,220.00
46	Kab. Pidie	2018	1,981,012.63	237,201.95	788,324.31	293,595.82
47	Kab. Pidie	2019	2,153,273.01	243,230.77	803,505.13	249,773.75

48	Kab. Pidie	2020	2,048,417.69	214,947.83	836,281.10	236,046.07
49	Kab. Pidie	2021	1,992,338.62	224,009.99	823,251.46	245,434.15
50	Kab. Pidie	2022	2,079,530.00	225,650.00	823,251.46	241,480.00
51	Kab. Simeulue	2018	713,207.30	25,255.30	444,544.70	132,388.79
52	Kab. Simeulue	2019	986,521.99	79,466.32	465,338.36	120,847.07
53	Kab. Simeulue	2020	815,256.62	96,837.49	422,324.53	74,894.76
54	Kab. Simeulue	2021	872,989.13	127,487.36	419,029.63	104,486.41
55	Kab. Simeulue	2022	807,955.88	81,980.22	419,892.37	87,720.00
56	Kota Banda Aceh	2018	1,173,868.93	246,272.15	591,711.77	116,595.70
57	Kota Banda Aceh	2019	1,230,049.04	235,123.07	605,014.83	111,593.86
58	Kota Banda Aceh	2020	1,272,346.41	227,747.62	547,629.39	123,927.63
59	Kota Banda Aceh	2021	1,207,566.18	224,364.76	557,079.90	145,524.90
60	Kota Banda Aceh	2022	1,329,620.28	314,456.73	524,217.02	173,321.32
61	Kota Sabang	2018	599,239.87	57,188.08	350,863.35	127,162.93
62	Kota Sabang	2019	676,394.20	59,329.69	379,312.21	99,666.77
63	Kota Sabang	2020	634,608.81	62,412.22	338,311.72	70,815.30
64	Kota Sabang	2021	679,559.41	57,778.23	332,134.42	90,691.20
65	Kota Sabang	2022	598,316.19	53,887.84	330,073.56	58,769.71
66	Kota Langsa	2018	788,531.15	121,335.71	444,012.58	131,946.20
67	Kota Langsa	2019	930,309.32	115,244.24	456,700.56	146,296.43
68	Kota Langsa	2020	860,018.23	126,277.86	414,459.53	92,428.56
69	Kota Langsa	2021	885,083.40	109,168.07	407,519.09	174,186.84
70	Kota Langsa	2022	803,507.95	119,851.99	407,519.09	108,900.00
71	Kota Lhokseumawe	2018	775,480.03	65,618.96	459,628.03	93,948.85
72	Kota Lhokseumawe	2019	873,465.60	61,442.55	469,471.44	103,034.97
73	Kota Lhokseumawe	2020	809,115.34	65,875.90	425,306.24	81,627.89
74	Kota Lhokseumawe	2021	786,577.97	61,984.62	418,626.65	82,989.58

75	Kota Lhokseumawe	2022	809,717.44	67,391.68	415,683.22	93,206.08
76	Kab. Gayo Lues	2018	872,246.98	48,725.61	462,943.02	169,968.14
77	Kab. Gayo Lues	2019	997,301.20	51,415.80	484,938.71	100,293.48
78	Kab. Gayo Lues	2020	922,032.64	58,402.72	423,662.73	99,673.44
79	Kab. Gayo Lues	2021	865,732.47	63,647.02	419,760.89	98,716.50
80	Kab. Gayo Lues	2022	811,005.83	63,766.26	420,433.21	96,940.00
81	Kab. Aceh Barat Daya	2018	814,001.63	83,468.42	451,309.79	192,663.13
82	Kab. Aceh Barat Daya	2019	1,002,636.62	90,348.94	460,983.80	143,804.48
83	Kab. Aceh Barat Daya	2020	966,546.61	111,763.37	415,850.39	107,986.65
84	Kab. Aceh Barat Daya	2021	903,352.46	91,756.42	410,875.41	105,666.48
85	Kab. Aceh Barat Daya	2022	867,531.58	81,580.78	411,099.62	136,570.00
86	Kab. Aceh Jaya	2018	792,016.39	58,624.90	421,315.26	150,114.01
87	Kab. Aceh Jaya	2019	921,787.79	72,776.85	437,094.04	112,724.65
88	Kab. Aceh Jaya	2020	903,081.17	79,460.10	397,557.69	84,857.49
89	Kab. Aceh Jaya	2021	920,479.08	75,576.34	392,655.87	130,845.65
90	Kab. Aceh Jaya	2022	892,843.17	71,265.50	393,215.55	139,300.00
91	Kab. Nagan Raya	2018	922,240.62	25,848.52	496,075.09	133,283.39
92	Kab. Nagan Raya	2019	1,126,913.76	87,625.37	514,300.66	142,074.13
93	Kab. Nagan Raya	2020	1,132,517.82	109,062.63	485,041.97	135,970.79
94	Kab. Nagan Raya	2021	1,085,782.51	98,407.36	477,108.05	147,020.72
95	Kab. Nagan Raya	2022	1,058,740.49	99,945.83	476,248.45	148,803.22
96	Kab. Aceh Tamiang	2018	1,078,867.52	142,646.82	532,641.69	163,435.94
97	Kab. Aceh Tamiang	2019	1,312,594.26	128,905.94	547,975.35	144,139.92
98	Kab. Aceh Tamiang	2020	1,193,037.02	125,638.09	493,792.58	115,154.69
99	Kab. Aceh Tamiang	2021	1,170,293.55	138,639.03	488,331.56	136,064.07
100	Kab. Aceh Tamiang	2022	1,280,619.04	126,026.48	488,964.33	219,740.00
101	Kab. Bener Meriah	2018	852,126.17	58,550.15	448,988.54	117,744.59

102	Kab. Bener Meriah	2019	1,031,786.19	86,415.54	458,759.08	138,907.34
103	Kab. Bener Meriah	2020	970,483.97	70,073.50	424,584.26	131,117.80
104	Kab. Bener Meriah	2021	994,763.86	62,891.54	417,698.51	139,008.98
105	Kab. Bener Meriah	2022	901,633.79	52,450.60	418,060.20	119,460.00
106	Kab. Pidie Jaya	2018	1,196,166.42	57,432.81	420,639.47	177,314.38
107	Kab. Pidie Jaya	2019	987,085.04	68,372.23	441,409.49	131,890.05
108	Kab. Pidie Jaya	2020	1,030,249.67	79,574.10	410,145.46	122,377.18
109	Kab. Pidie Jaya	2021	951,836.82	82,373.81	404,301.75	122,846.95
110	Kab. Pidie Jaya	2022	953,468.15	99,308.98	403,321.54	170,694.31
111	Kota Subulussalam	2018	562,252.54	38,955.59	345,246.78	74,571.11
112	Kota Subulussalam	2019	713,307.98	51,810.00	353,735.07	93,264.88
113	Kota Subulussalam	2020	605,303.00	56,850.61	318,039.40	60,439.66
114	Kota Subulussalam	2021	651,697.65	57,924.00	313,862.65	84,148.15
115	Kota Subulussalam	2022	511,010.00	9,970.00	314,289.55	136,700.00



Lampiran 2

Rata-Rata Data Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	BD	PAD	DAU	DAK
1	Kab. Aceh Barat	1,316,966.69	147,527.37	563,693.81	180,474.99
2	Kab. Aceh Besar	1,801,069.47	164,587.17	748,091.32	216,777.18
3	Kab. Aceh Selatan	1,382,785.28	144,227.90	620,289.16	245,996.00
4	Kab. Aceh Singkil	832,066.54	46,220.22	426,163.95	139,829.95
5	Kab. Aceh Tenggara	1,314,897.59	172,275.69	589,843.31	180,716.62
6	Kab. Aceh Timur	1,733,658.42	131,764.66	791,620.56	203,804.66
8	Kab. Aceh Utara	2,461,084.19	221,274.20	878,445.33	393,143.06
9	Kab. Bireuen	1,863,140.87	160,110.41	803,531.93	266,065.38
10	Kab. Pidie	2,050,914.39	229,008.11	814,922.69	253,265.96
11	Kab. Simeulue	839,186.18	82,205.34	434,225.92	104,067.41
12	Kota Banda Aceh	1,242,690.17	249,592.87	565,130.58	134,192.68
13	Kota Sabang	637,623.70	58,119.21	346,139.05	89,421.18
14	Kota Langsa	853,490.01	118,375.57	426,042.17	130,751.61
15	Kota Lhokseumawe	810,871.28	64,462.74	437,743.12	90,961.47
16	Kab. Gayo Lues	893,663.82	57,191.48	442,347.71	113,118.31
17	Kab. Aceh Barat Daya	910,813.78	91,783.59	430,023.80	137,338.15
18	Kab. Aceh Jaya	886,041.52	71,540.74	408,367.68	123,568.36
19	Kab. Nagan Raya	1,065,239.04	84,177.94	489,754.84	141,430.45
20	Kab. Aceh Tamiang	1,207,082.28	132,371.27	510,341.10	155,706.92
21	Kab. Bener Meriah	950,158.80	66,076.27	433,618.12	129,247.74
22	Kab. Pidie Jaya	1,023,761.22	77,412.39	415,963.54	145,024.57
23	Kota Subulussalam	608,714.23	43,102.04	329,034.69	89,824.76

Lampiran 3

Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: BD
Method: Panel Least Squares
Date: 06/05/23 Time: 22:23
Sample: 2018 2022
Periods included: 5
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-298698.7	40756.40	-7.328879	0.0000
PAD	1.040688	0.260403	3.996452	0.0001
DAU	2.570631	0.102308	25.12649	0.0000
DAK	-0.001137	0.001011	-1.123625	0.2636
Root MSE	117164.2	R-squared		0.939291
Mean dependent var	1215256.	Adjusted R-squared		0.937650
S.D. dependent var	477601.5	S.E. of regression		119256.6
Akaike info criterion	26.25011	Sum squared resid		1.58E+12
Schwarz criterion	26.34558	Log likelihood		-1505.381
Hannan-Quinn criter.	26.28886	F-statistic		572.4672
Durbin-Watson stat	0.656496	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 4

Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: BD

Method: Panel Least Squares

Date: 06/05/23 Time: 22:26

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	258288.5	186126.9	1.387701	0.1687
PAD	2.132390	0.317855	6.708680	0.0000
DAU	1.306877	0.331020	3.948026	0.0002
DAK	-0.001110	0.000668	-1.661426	0.1001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	62438.33	R-squared	0.982759
Mean dependent var	1215256.	Adjusted R-squared	0.977916
S.D. dependent var	477601.5	S.E. of regression	70974.97
Akaike info criterion	25.37392	Sum squared resid	4.48E+11
Schwarz criterion	25.99451	Log likelihood	-1433.000
Hannan-Quinn criter.	25.62582	F-statistic	202.9237
Durbin-Watson stat	2.064057	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 5

Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: BD
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/05/23 Time: 22:28
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 115
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-194517.7	69487.91	-2.799303	0.0060
PAD	1.983256	0.266107	7.452844	0.0000
DAU	2.174729	0.138164	15.74023	0.0000
DAK	-0.001200	0.000659	-1.821359	0.0712
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			94573.02	0.6397
Idiosyncratic random			70974.97	0.3603
Weighted Statistics				
Root MSE	73401.96	R-squared		0.812335
Mean dependent var	386672.1	Adjusted R-squared		0.807263
S.D. dependent var	170181.4	S.E. of regression		74712.81
Sum squared resid	6.20E+11	F-statistic		160.1595
Durbin-Watson stat	1.389068	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.930314	Mean dependent var		1215256.
Sum squared resid	1.81E+12	Durbin-Watson stat		0.474958

Lampiran 6

Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.199282	(22,89)	0.0000
Cross-section Chi-square	144.761263	22	0.0000

Lampiran 7

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.999322	3	0.0018

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAD	2.132390	1.983256	0.030219	0.3909
DAU	1.306877	2.174729	0.090485	0.0039
DAK	-0.001110	-0.001200	0.000000	0.4195

Lampiran 8

Tinjauan *Flypaper Effect* Ukuran DAU

Kabupaten/Kota	Tinjuan <i>Flypaper Effect</i>	
	Intersep DAU	Koefisien
Kab. Aceh Barat	9.660.464	279274.9
Kab. Aceh Besar	223976.5	279274.9
Kab. Aceh Selatan	10870.44	279274.9
Kab. Aceh Singkil	-85196.93	279274.9
Kab. Aceh Tenggara	-7826448	279274.9
Kab. Aceh Tenggara	99436.04	279274.9
Kab. Aceh Timur	171428.8	279274.9
Kab. Aceh Utara	598145.5	279274.9
Kab. Bireuen	225410.6	279274.9
Kab. Pidie	251900.8	279274.9
Kab. Simeulue	-164989.5	279274.9
Kota Banda Aceh	-284000.4	279274.9
Kota Sabang	-203703.6	279274.9
Kota Langsa	-217427.6	279274.9
Kota Lhokseumawe	-159936.1	279274.9
Kab. Gayo Lues	-67472.69	279274.9
Kab. Aceh Barat Daya	-108459.8	279274.9
Kab. Aceh Jaya	-62668.26	279274.9
Kab. Nagan Raya	-13433.38	279274.9
Kab. Aceh Tamiang	-3.796.955	279274.9
Kab. Bener Meriah	-18866.31	279274.9
Kab. Pidie Jaya	52919.97	279274.9
Kota Subulussalam	-178950.3	279274.9

Lampiran 9

Tinjauan *Flypaper Effect* Ukuran DAK

Kabupaten/Kota	Tinjuan <i>Flypaper Effect</i>	
	Intersep DAK	Koefisien
Kab. Aceh Barat	39098.45	977857.1
Kab. Aceh Besar	488522.6	977857.1
Kab. Aceh Selatan	111690.3	977857.1
Kab. Aceh Singkil	-217947.7	977857.1
Kab. Aceh Tenggara	-13326.19	977857.1
Kab. Aceh Tenggara	119365.5	977857.1
Kab. Aceh Timur	487884.1	977857.1
Kab. Aceh Utara	1033356.	977857.1
Kab. Bireuen	559747.9	977857.1
Kab. Pidie	607322.6	977857.1
Kab. Simeulue	-305840.2	977857.1
Kota Banda Aceh	-242894.4	977857.1
Kota Sabang	-458407.7	977857.1
Kota Langsa	-365108.1	977857.1
Kota Lhokseumawe	-298066.0	977857.1
Kab. Gayo Lues	-200458.3	977857.1
Kab. Aceh Barat Daya	-253671.2	977857.1
Kab. Aceh Jaya	-237267.7	977857.1
Kab. Nagan Raya	-83766.93	977857.1
Kab. Aceh Tamiang	-39970.27	977857.1
Kab. Bener Meriah	-162026.6	977857.1
Kab. Pidie Jaya	-111475.5	977857.1
Kota Subulussalam	-456761.2	977857.1

BIODATA

Nama : Dila Masyitah
NIM : 190604073
Tempat/Tgl. Lahir : Trienggadeng/14 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswi
Alamat : Mee Tanjong Usi
No. Hp : 085261212944
Email : 190604073@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Aisyiyah Blangpidie
2. SD : SDN Blang Malu
3. SMP : SMPN 1 Mutiara
4. SMA : SMAN 1 Mutiara
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Zainuddin
Pekerjaan : Sopir
Nama Ibu : Erlina Nurdin
Pekerjaan : PNS
Alamat Orang Tua : Mee Tanjong Usi